



KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA



PERIODE 05 OKTOBER 2023



-Biro Humas dan Informasi Publik-

Title	Asean+3 Masih Dibayangi Inflasi Tinggi	 Kementerian Pertanian
Date	5 Oktober 2023	
Media	Koran Jakarta	
Page	5	
Author	Ant/E-10	

Proyeksi 2024

Asean+3 Masih Dibayangi Inflasi Tinggi

JAKARTA – Inflasi di kawasan Asean+3 tahun depan diproyeksikan tetap di level tinggi. Kondisi tersebut diperkirakan akibat dampak kenaikan harga komoditas global dan tingginya perkembangan inflasi inti di beberapa negara.

Kantor Penelitian Makroekonomi Asean+3 atau Asean+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) menaikkan proyeksi inflasi kawasan Asean+3 pada 2024 menjadi 3,8 persen dari perkiraan sebelumnya 3,4 persen pada Juli 2023. Sementara, inflasi di kawasan Asean+3 tidak termasuk Laos dan Myanmar diproyeksikan akan moderat menjadi 2,6 persen pada 2024, dari perkiraan tahun 2023 sebesar 2,9 persen.

“Pada 2024, inflasi umum diperkirakan masih moderat, namun lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya,” kata Kepala Ekonom AMRO Hoe Ee Khor terkait pembaruan triwulanan Asean+3 Regional Economic Outlook (AREO) Oktober 2023 dalam konferensi pers yang diikuti virtual di Jakarta, Rabu (4/10).

Sepuluh dari kawasan Asean+3 kini diperkirakan akan mengalami tingkat inflasi yang lebih tinggi pada 2024 dibandingkan dengan perkiraan pada Juli 2023, karena tren peningkatan harga komoditas global dan masih tingginya inflasi inti di beberapa negara. “Keseimbangan risiko secara keseluruhan terhadap prospek perekonomian telah bergeser, dengan risiko

inflasi yang lebih tinggi menjadi lebih besar,” ujarnya.

Hoe menuturkan meskipun risiko dampak keuangan akibat kebijakan moneter Amerika Serikat (AS) yang lebih ketat telah sedikit mereda sejak pembaruan AREO pada Juli 2023, risiko lonjakan harga energi dan pangan global telah meningkat. Inflasi di

« Pada 2024, inflasi umum diperkirakan masih moderat, namun lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya. »

HOE EE KHOR
Kepala Ekonom AMRO

seluruh kawasan meningkat menjelang akhir kuartal ketiga 2023, didorong oleh kenaikan harga energi dan pangan.

Pada September 2023, harga minyak mentah mencapai titik tertinggi sejak awal 2023, menyusul keputusan Arab Saudi dan Russia untuk memperpanjang pengurangan produksi minyak hingga akhir tahun ini.

Suplai Terganggu

Sementara itu, kondisi cuaca kering yang tidak terduga akibat El Niño, ditambah dengan pembatasan ekspor oleh produsen-produk utama, telah mengganggu pasokan pertanian dan menyebabkan lon-

jakan harga pangan. Inflasi inti tetap lebih tinggi dibandingkan inflasi umum di beberapa negara, yang mencerminkan kuatnya tekanan permintaan.

AMRO menaikkan perkiraan inflasi 2024 di Jepang menjadi 1,9 persen dibanding proyeksi sebelumnya 1,6 persen pada Juli 2023, sedangkan inflasi Korea diproyeksikan 2,3 persen, meningkat dibandingkan perkiraan sebelumnya sebesar 2,2 persen.


Selanjutnya, inflasi di Brunei Darussalam diproyeksikan sebesar 1,1 persen pada 2024, naik dari perkiraan sebelumnya sebesar 0,7 persen, dan Laos sebesar 11,2 persen, meningkat dari perkiraan sebelumnya sebesar 8 persen.

Inflasi 2024 di Singapura diperkirakan sebesar 4,1 persen, lebih besar dari perkiraan sebelumnya 3,6 persen, Thailand sebesar 2 persen, naik dari proyeksi sebelumnya 1,8 persen, dan Vietnam sebesar 3,4 persen, meningkat dari perkiraan sebelumnya 2,7 persen.

Sementara itu, AMRO tetap mempertahankan proyeksinya untuk inflasi Indonesia pada 2024 sebesar 2,8 persen, Myanmar 11 persen, Filipina 3,8 persen, Malaysia 2,6 persen, Hongkong di Tiongkok sebesar 2,5 persen. Sedangkan inflasi di Kamboja diproyeksikan sebesar 2,7 persen, lebih rendah dari perkiraan sebelumnya 3 persen, dan Tiongkok sebesar 1,4 persen, lebih rendah dari perkiraan sebelumnya 1,8 persen. ■ Ant/E-10

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMANTAN**

Title	Bappenas: Isu Transisi Energi dan Ketahanan Pangan Penting untuk Debat Capres-Cawapres	 Kementerian Pertanian
Date	5 Oktober 2023	
Media	Koran Jakarta	
Page	3	
Author	Ant/S-2	

Pilpres 2024

Bappenas: Isu Transisi Energi dan Ketahanan Pangan Penting untuk Debat Capres-Cawapres

DENPASAR - Kementerian PPN/Bappenas menilai isu transisi energi menuju energi baru terbarukan (EBT), ketahanan pangan, dan transformasi digital penting untuk dibahas dalam debat calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

"Penting ini karena ada transisi energi dan transformasi digital yang terus akan menjadi isu nasional dan global. Mereka (kandidat capres-cawapres) akan baca, iya harusnya isu dalam debat," kata Koordinator Ekosistem dan Pemanfaatan TIK Direktorat Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan In-

formatika, Kementerian PPN/Bappenas Andianto Haryoko saat peresmian platform Solar Energy Estimator for Rooftop in Indonesia (SEERI) di Kabupaten Badung, Bali, Rabu (4/10).

"Tergantung nanti KPU, KPU kan nanti akan menerima draft RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) untuk dijadikan isu yang ditanyakan," sambungnya.

Andianto mengatakan belum tahu isu transisi energi dan transformasi digital menempati urutan ke berapa dalam prioritas nasional, namun menurutnya sebagai salah satu isu nasional, penyelenggara

pemilu dapat menyusun pertanyaannya berangkat dari masalah ini.

Kementerian PPN/Bappenas sendiri memiliki tugas pokok dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) untuk 20 tahun dan RPJMN untuk lima tahunan, dan saat ini sedang terus berproses.

Rincian dalam RPJMN itu nantinya akan dibaca oleh capres-cawapres sehingga mereka harus menyesuaikan dengan rencana pemerintah, dan di tengah peluncuran platform yang berguna untuk mengidentifikasi potensi pemasang-

an PLTS Atap itu, Andianto mengatakan bahwa hasil proyek tersebut akan dimasukkan dalam RPJMN.


"Nanti kemudian, draft atau konsep yang kita bangun itu nanti akan disampaikan langsung kepada pasangan kontestan capres dan cawapres. Di dalam rancangan yang lalu, salah satu prioritas nasional adalah transformasi digital," ujarnya.

"Ada beberapa prioritas nasional lain selain transformasi digital, yaitu transisi energi, ketahanan pangan dan lain sebagainya. Jadi ini salah satu prioritas nasional kita, prio-

ritas nomor empat dan di dalam prioritas nasional kelima," sambung Andianto.

Dalam kesempatan itu Kementerian PPN/Bappenas juga sedang memulai proyek transformasi digital dan transisi energi bekerja sama dengan Pemerintah Jerman, dengan output sebuah portal berbasis AI dan citra satelit yang dinamai SEERI.

Dari proyek ini menunjukkan upaya kementerian tersebut dalam memanfaatkan teknologi untuk menganalisa pemanfaatan EBT khususnya energi surya di dalam solar rooftop atau PLTS Atap. ■ Ant/S-2

Title	Bulog Diminta Lanjutkan Intervensi	 Kementerian Pertanian
Date	5 Oktober 2023	
Media	Koran Jakarta	
Page	5	
Author	Ers/E-10	

Inflasi Pangan | Saat Ini, Stok Beras di Perum Bulog Capai 1,7 Juta Ton

Bulog Diminta Lanjutkan Intervensi

Intervensi pasar dengan menggelontorkan beras ke sejumlah pasar harus terukur agar tak sia-sia dan membuat stok menipis sehingga membuka celah untuk importasi pangan.

JAKARTA – Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) menginstruksikan Bulog agar terus menggelontorkan beras ke pasar, termasuk Pasar Beras Induk Cipinang (PIBC). Langkah tersebut diharapkan dapat menekan harga bahan pokok tersebut sehingga dapat terkoreksi menuju titik keseimbangan baru.

“Saat ini, harga beras di PIBC sudah mengalami penurunan sehingga kita berharap harga beras di pasar turunan juga terus terkoreksi dan stabilitas harga dapat tercapai,” ujar Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, saat meninjau gudang beras di

PIBC dan meninjau Pasar Rawamangun, Jakarta, Rabu (4/10).

Menurut Arief, harga beras akan tertahan melalui upaya penggelontoran beras SPHP ke semua lini pasar. “Harga beras semestinya bisa tertahan dengan beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) dibanjiri ke PIBC seperti ini. Beras SPHP juga pemerintah salurkan melalui ritel modern dan pasar tradisional. Ini terus kita lakukan sambil menunggu panen,” imbuh Arief.

Dia menuturkan adanya rencana penambahan bantuan pangan beras agar peran Cadangan Beras Pemerintah

(CBP) dapat semakin menekan harga. “Dalam Ratas (rapat terbatas) terakhir, Bapak Presiden Joko Widodo telah meminta Ibu Menteri Keuangan untuk menyiapkan kelanjutan bantuan pangan beras di Desember tahun ini. NFA bersama Bulog senantiasa memastikan stok CBP tersedia dan siap salur ke masyarakat luas,” pungkas Arief.

Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso, menyampaikan ketersediaan stok selalu menjadi perhatian pemerintah. “Kalau produksi kurang, pasti Bapak Presiden minta Bulog untuk tambah stok beras, karena pemerintah itu menjamin ketersediaan bagi masyarakat secara luas. Sampai akhir tahun stok aman, prediksi kita masih ada 1,2 juta ton,” ujar Budi.

Adapun hingga saat ini stok beras yang ada di Bulog mencapai 1,7 juta ton, yang terdiri dari CBP sebanyak 1,67 juta

ton dan stok komersil sekitar 69 ribu ton. Sementara penyaluran beras juga telah mencapai angka 1,7 juta ton yang digunakan antara lain realisasi SPHP sebanyak 799 ribu ton, bantuan pangan tahap pertama sebesar 640 ribu ton, dan bantuan pangan beras tahap kedua yang saat ini terus digenjut dengan realisasi terakhir telah mencapai 98,5 persen untuk bulan pertama sebesar 197 ribu ton.

Ramalan BMKG

Sementara itu, Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, memprediksi musim kemarau akan berakhir di sebagian besar wilayah Indonesia mulai akhir Oktober ini, dan awal musim hujan secara bertahap, dimulai awal November 2023. Namun, akibat tingginya keragaman iklim, maka awal musim hujan tidak terjadi secara serentak di seluruh wilayah


Indonesia. Sementara puncak musim hujan diprediksi akan terjadi pada bulan Januari-Februari 2024.

“Sesuai prediksi BMKG, puncak dampak El Nino terjadi pada bulan September, namun tadi kami juga menganalisis dari data satelit yang terkini, terlihat Oktober ini nampaknya intensitas El Nino belum turun. Fenomena El Nino ini diprediksi masih akan terus bertahan hingga tahun depan,” ungkap di Jakarta, Selasa (3/10).

Dwikorita mengatakan level El Nino moderat akan terus bertahan dan berakhir pada bulan Februari-Maret 2024. Awal musim hujan sendiri, kata dia, berkaitan erat dengan peralihan Monsun Australia menjadi Monsun Asia. Saat ini, lanjut Dwikorita, Monsun Asia sudah mulai memasuki wilayah Indonesia sehingga diprediksi bulan November akan mulai turun hujan. ■ **ers/E-10**

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMANTAN**

Title	Khofifah Minta Jaga Ketahanan Pangan dengan Manfaatkan Lahan	 Kementerian Pertanian
Date	5 Oktober 2023	
Media	Koran Jakarta	
Page	11	
Author	Ant/I-1	

Khofifah Minta Jaga Ketahanan Pangan dengan Manfaatkan Lahan

Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa, meminta masyarakat di wilayahnya dapat menjaga ketahanan pangan melalui pemanfaatan lahan yang ada harus dilakukan secara komprehensif serta dibangun oleh semua lini secara efektif dan efisien.

“Salah satu contohnya sayur-sayuran bisa dioptimalkan di lahan terbatas dengan menggunakan *polybag* hingga *hydroponic*. Mari manfaatkan lahan di lingkungan terkecil yang kita miliki,” kata Gubernur Khofifah dalam keterangannya yang diterima di Surabaya, Rabu (4/10).

Selain itu, Gubernur Khofifah juga mengingatkan, saat ini dunia sedang menghadapi krisis pangan, energi dan keuangan, untuk itu, sejumlah upaya mitigasi akan terus disiapkan.

“Seperti saat musim kemarau, banyak area persawahan yang membutuhkan irigasi, sehingga meminta setiap daerah membuat sumur pompa,” ujar dia.

Khofifah menyalurkan secara langsung berbagai bantuan, tali asih, dan zakat produktif kepada para penerima manfaat di Tuban yang merupakan titik ke-14. Bantuan tersebut, antara lain

Program Keluarga Harapan (PKH), Perlindungan Lanjut Usia (Plus) kepada 2.333 penerima manfaat yang disalurkan secara simbolis kepada 20 penerima manfaat.

Kemudian, bansos Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) kepada 34 PM penyandang disabilitas, bantuan alat bantu mobilitas disabilitas sebanyak 37 unit, dan bansos Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) kepada 60 penerima manfaat.

Ada pula, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

(DBHCHT) untuk buruh pabrik rokok lintas wilayah Jatim asal Tuban kepada 26 PM, yang sebelumnya telah diserahkan juga di Surabaya kepada 797 penerima manfaat.

Selain itu, diserahkan pula tali asih kepada 20 orang personel Taruna Siaga Bencana (Tagana), 20 orang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan bantuan transportasi kepada 30 Pendamping PKH.

Menurut Khofifah, bansos tersebut disalurkan melalui cash transfer dengan

difasilitasi Bank Jatim dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana pemanfaatan bantuan yang telah diberikan Pemprov Jatim kepada penerima manfaat. “Kita semua berdoa *panjenengan* (Anda) rezekinya berkah. Dan Allah memberikan kesejahteraan di dunia dan akhirat,” kata Gubernur Khofifah.

Pada kesempatan yang sama, disalurkan pula zakat produktif untuk 100 pelaku usaha ultra mikro di wilayah Tuban.


Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky menyampaikan terima kasih atas perhatian Gubernur Khofifah yang telah memberikan berbagai bansos hingga penyaluran zakat produktif kepada masyarakat penerima.

Menurut dia, apa yang telah dilakukan Gubernur Khofifah merupakan bentuk kecintaan kepada masyarakatnya, dan hal tersebut merupakan sebuah *legacy* yang baik dan menjadi inspirasi.

“Apa yang dilakukan oleh ibu gubernur merupakan sebuah *legacy* yang perlu diteruskan. Kita harap, setelah diberikan zakat maupun bansos para penerima bisa meng-*upgrade* diri sehingga meningkatkan perekonomiannya,” tutur dia. ■ Ant/I-1



KOMINFO JATIMPROV/021123

Title	Sulteng Menjadi Penyangga Pangan IKN	 Kementerian Pertanian
Date	5 Oktober 2023	
Media	Koran Jakarta	
Page	12	
Author	Ant/and	

Ketahanan Pangan | Momentum Strategis Kembangkan Sektor Pertanian Lokal

Sulteng Menjadi Penyangga Pangan IKN

Wapres berharap pembangunan dan pengelolaan KPN dapat melibatkan masyarakat setempat, di antaranya kelompok tani, gapoktan, dan korporasi petani.

PALU – Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meresmikan Kawasan Pangan Nusantara (KPN) yang berlokasi di Desa Talaga, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, yang diharapkan menjadi penopang sektor ketahanan pangan Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, Kawasan Pangan Nusantara yang berada di Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, saya resmikan,” kata Ma'ruf Amin saat meresmikan Kawasan Pangan Nusantara di Kabupaten Donggala, Sulteng, Rabu (4/10).

Menurut Wapres, pembangunan IKN akan mendorong konsentrasi penambahan jumlah penduduk yang cukup tinggi sehingga perlu untuk dipenuhi kebutuhan pangannya.

“Oleh karena itu, saya menyambut baik penetapan Sulawesi Tengah sebagai Kawasan Pangan Nusantara,” kata Wapres.

Menurut Ma'ruf, sektor pertanian Provinsi Sulteng dapat kembali bangkit pascabencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi pada tahun 2018

berkat dukungan dari kinerja pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat.

“Capaian indeks ketahanan dan kerawanan pangan Sulteng berhasil meraih skor 5 atau kategori tahan,” kata dia.

Dia berharap KPN yang memiliki luas sekitar 1.124 hektare yang merupakan sebuah kawasan terpadu diharapkan dapat menjadi penyangga IKN pada ketahanan sektor pangan.

Selain itu, KPN juga diharapkan dapat memberikan dukungan kepada bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan dengan tetap menjaga kebutuhan Provinsi Sulawesi Tengah.

“Hadirnya Kawasan Pangan Nusantara harus mampu meningkatkan ekonomi masyarakat Sulawesi Tengah melalui penguatan sentra produksi pangan, kapasitas dan kapabilitas sektor pangan, mendekatkan akses modal, serta meningkatkan daya saing produk lokal dan kelembagaan,” kata Ma'ruf.

Dalam mendukung Kawasan Pangan Nusantara, Wapres meminta agar seluruhnya pihak dapat meningkatkan

kerja sama dan sinergisitas dalam menyuplai pangan IKN.

Namun, dia meminta untuk tetap memperhatikan kaidah-kaidah hukum dan lingkungan serta kesesuaian tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

“Namun, perlu menjadi perhatian masalah sektor produksi padi di mana penurunan luas panen menyebabkan produktivitas padi ikut turun. Hal ini harus segera diatasi,” kata Wapres.

« Hadirnya Kawasan Pangan Nusantara harus mampu meningkatkan ekonomi masyarakat Sulawesi Tengah. »

MA'RUF AMIN
Wakil Presiden RI

Penyangga IKN

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdy Mastura, mengatakan peresmian Kawasan Pangan Nusantara (KPN) di Kabupaten Donggala merupakan momentum strategis untuk mengembangkan potensi sektor pertanian di wilayah itu.

“Peresmian Kawasan Pa-

ngan Nusantara di Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, ini merupakan momentum strategis untuk pengembangan potensi sektor pertanian yang sebagai ciri masyarakat Sulteng,” kata Rusdy Mastura saat menyampaikan laporan terkait Kawasan Pangan Nusantara di Kabupaten Donggala, Sulteng, Rabu.

Ia menyampaikan bahwa proses penyiapan lahan KPN di Provinsi Sulteng telah dimulai sejak tahun 2022 dengan luas kawasan sekitar 1.123 hektare, serta luas lahan yang efektif ditanami seluas 880 hektare.


Menurut Gubernur, KPN diproyeksikan dapat memberikan nilai tambah bagi Sulawesi Tengah yang berkedudukan sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur.

Oleh karena itu, Rusdy berharap keberadaan KPN dapat mendapatkan dukungan dan partisipasi dari berbagai pihak agar dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat Sulteng.

“Dalam rangka mendukung sarana konektivitas pada KPN ini, kami juga mengusulkan kepada pemerintah pusat beberapa dukungan infrastruktur seperti rencana pembangunan Jalan Bypass Tambu-Kasimbar serta Pembangunan Pelabuhan Tambu, dan Kasimbar,” kata Gubernur. ■ Ant/and

Dokumentasi

BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMANTAN

Title	Kaji Ulang HPP dan HET Beras	 Kementerian Pertanian
Date	5 Oktober 2023	
Media	Bisnis Indonesia	
Page	20	
Author	K34	

| GEJOLAK HARGA BERAS |

Kaji Ulang HPP dan HET Beras

Bisnis, BANDUNG — Pemerintah, petani, pengusaha dan semua yang terlibat dalam rantai pasok beras diminta untuk duduk bersama untuk mengatasi harga beras yang tidak juga stabil.

Ketua DPD Harian HKTI Jawa Barat Entang Sastiatmadja mengatakan hal ini merupakan dampak domino dari ketidakjelasan arah kebijakan pangan di Tanah Air. Sehingga, ia memprediksi dampak ini akan tetap terjadi hingga beberapa bulan ke depan.

“Saat ini juga kan musim lagi kemarau, jadi kemungkinan [harga] beras masih akan tetap seperti sekarang,” ungkap Entang kepada *Bisnis*, Rabu (4/10).

Seharusnya, kata Entang, ini menjadi momentum yang untuk kembali mengkaji ulang Harga Pokok Penjualan (HPP) gabah dan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras. Pasalnya, dengan kenaikan harga beras saat ini tidak sama sekali memberi nilai tambah ekonomi bagi petani.

“Sekarang kita tahu HPP ini

sepertinya mengekang petani untuk mendapat harga gabah yang baik, jadi sedikit-sedikit harga gabah naik itu harus kembali ke HPP, kalau harga beras meningkat ugul-ugulan kembali ke HET, buat saya bukan hanya soal dikembalikan, tapi ditinjau ulang apa memang harga itu terlalu rendah dalam situasi kekinian,” ungkap dia.

Sementara itu, petani sebagai produsen harus memproduksi padi dengan harga sarana produksi padi yang tinggi, namun

gabahnya diterima dengan harga murah.

“Pemerintah juga harus membaca harga Saprodi [Sarana Produksi] untuk menghasilkan padi itu naik, ini sudah tidak sebanding dari kenaikan harga beras dengan pendapatan para petani. jadi tinjau lah secara utuh dan menyeluruh,” ungkap dia.

Menurut dia, pihak yang paling diuntungkan dalam kondisi saat ini tidak lain adalah distributor. Hal tersebut dibuktikan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS)

Jabar yang mencatat jarak yang sangat lebar dari Harga Gabah Kering Giling (GKG) terhadap beras di pasaran yang mencapai Rp5.665 atau naik 9,67% dari Agustus 2023.

Hal terbalik terjadi pada Harga Gabah Kering Petani (GKP) yang hanya dihargai Rp6.577 per kilogram. “Untung lebih besar di distributor tapi yang dirugikan pasti produsen dan konsumen, pedagang ini sebagai perantara selalu mendapatkan nilai ekonomi. Tapi petani yang


berisiko tidak mendapatkan nilai tambah ekonomi,” jelasnya.

Untuk itu ia mendorong HPP dan HET beras ini harus ditinjau ulang dengan rumus tani yang memang sudah ada. Sehingga, harga beras ini bisa dinilai apakah terlalu tinggi atau memang pantas dihargai dengan harga rata-rata yang saat ini terjadi di pasaran.

“Petani itu ditekan untuk menghasilkan gabah dengan sarana produksi mahal, tapi dihargai dengan murah,” jelasnya. **(G34)**

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMANTAN**

Title	Opsi Impor Beras China Dibuka	 Kementerian Pertanian
Date	5 Oktober 2023	
Media	Bisnis Indonesia	
Page	5	
Author	Dwi Rachmawati	

| STABILISASI HARGA PANGAN |

Opsi Impor Beras China Dibuka

Bisnis, JAKARTA — Pemerintah bersiap membuka opsi impor beras sebanyak 1,5 juta ton pada akhir 2023 guna menjaga cadangan beras pemerintah tetap pada level aman.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan opsi tersebut muncul seiring produksi beras yang mengalami defisit hingga akhir tahun.

“Setelah November [impor] 1,5 juta ton, pokoknya apapun kami kerjakan. Kalau memang kurang, kenapa *enggak*? Pilih mana, punya stok atau tidak punya stok?” katanya saat ditemui di Pasar Rawamangun Jakarta, Rabu (4/10).

Arief mengatakan impor beras akan dilakukan secukupnya untuk kebutuhan cadangan beras pemerintah (CDP) dan stabilisasi harga.

Saat ini, penyerapan dari petani sulit dilakukan oleh

Perum Bulog lantaran harga yang terlampau tinggi.

Menurutnya, stok beras di Bulog harus tersedia 1 juta ton di akhir tahun. “Hitungan kami ya begitu,” tuturnya.

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan total beras impor yang sudah didatangkan Bulog sebanyak 1,7 juta ton dari kuota 2 juta ton.

Adapun, 300.000 ton sisanya masih dalam proses untuk didatangkan. Pemerintah menargetkan impor beras 2 juta ton rampung pada November 2023.

“Kan beli beras itu dari sana harus di-*packing* dulu terus diangkut ke kapal baru dibawa ke Indonesia, itu sebenarnya yang 300.000 [ton] lagi,” katanya.

Dia menyebutkan stok beras yang dimiliki Bulog tersisa 1,7 juta ton juga akan digunakan untuk operasi pasar dan

bantuan pangan ke 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) hingga November 2023.


Sebagai antisipasi menjaga stok beras akhir tahun di saat risiko penurunan produksi karena El Nino, dia mulai menjajaki potensi impor beras apabila kuota tambahan diperlukan di akhir tahun, salah satunya dari China.

“Jadi kalau *emergency*, kami sudah bisa dapat dari China. Jadi itu kami tidak ketergantungan dari negara-negara lain kalau India sampai sekarang ini masih tutup,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey membeberkan bahwa lonjakan harga beras menjadi kendala mereka dalam pengadaan stok. Bahkan, sebagian besar ritel telah menghadapi harga pembelian beras di produsen hampir mendekati HET beras premium. (Dwi Rachmawati)

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMANTAN**

Title	PENINGKATAN PRODUKSI BERAS	
Date	5 Oktober 2023	
Media	Bisnis Indonesia	
Page	11	
Author	Bisnis/Rachman	

■ PENINGKATAN PRODUKSI BERAS



Bisnis/Rachman

Petani menanam benih padi di areal lahan sawah garapannya di kawasan Jalan Sekejati, Bandung, Jawa Barat, Rabu (4/10). Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyebutkan perlu ada peningkatan produksi beras sekitar 3,5 juta ton setiap tahunnya agar bisa lepas

dari importasi. Rata-rata produksi beras Indonesia sejak 2018 hingga 2022 cenderung stagnan di kisaran 31,93 juta ton, sementara tren jumlah penduduk dalam lima tahun terakhir mengalami kenaikan sekitar 2,9 juta jiwa per tahun.

Title	TEPIS SAKAL LOMPATAN PDRB
Date	5 Oktober 2023
Media	Bisnis Indonesia
Page	6
Author	Arif Gunawan & M. Noli Hendra



| DAMPAK KARHUTLA & KEKERINGAN |

TEPIS SAKAL LOMPATAN PDRB

Kinerja perekonomian daerah sepanjang tahun berjalan masih cukup solid, meski dihadapkan pada meningkatnya inflasi dan masih lesunya daya beli masyarakat. Akan tetapi, dampak dari kasus kebakaran hutan dan lahan, serta kekeringan di sejumlah daerah tak boleh dipandang remeh agar performa produk domestik regional bruto ditutup dengan gemilang pada akhir 2023.

Arif Gunawan & M. Noli Hendra
redaksi@bisnis.com

Industri penerbangan di Provinsi Riau, misalnya yang dikhawatirkan bakal terdampak dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) belakangan ini.

Karhutla yang menyebabkan kabut asap di wilayah ini dikhawatirkan bakal mengaruhi layanan penerbangan di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, yang dikelola oleh PT Angkasa Pura II.

Executive General Manager Bandara Pekanbaru Radityo Ari Purwoko bahkan mengakui bahwa ada pengaruh kabut asap terhadap operasi penerbangan dan kenyamanan penumpang.

"Dampak kabut asap ini kami mencatat ada gangguan terhadap jadwal penerbangan selama 1 hari. Dampak ini paling besar dirasakan oleh maskapai penerbangan dan penumpang," ujarnya Rabu (4/10).

Oleh karena itu, otoritas bandara Pekanbaru siap untuk memberikan pelayanan terbaik kepada maskapai yang terpengaruh oleh kondisi asap ini.

Langkah tersebut dilakukan melalui sejumlah hal a.l. penundaan beberapa jadwal penerbangan selama beberapa jam saat kabut asap melanda, dan memberikan layanan ekstra seperti perpanjangan waktu layanan dari biasanya pukul 21.00 WIB, menjadi hingga pukul 23.00 WIB.

Akibatnya, penumpang pesawat kelas bisnis dan para wisatawan kerap merasa terganggu dengan penundaan jadwal tersebut. Tak ayal, penundaan jadwal penerbangan itu pun menjadi sorotan Association of The Indonesian Tour and Travel Agencies (Asita) Riau.

Ketua Asita Riau Dede Firmansyah mengatakan bahwa ada kerugian yang dialami pengusaha *travel* dan para wisatawan.

"Salah satu masalah yang sering muncul adalah penundaan penerbangan yang telah terjadi berulang kali sejak

kabut asap melanda Riau. Namun, hingga saat ini belum terlihat upaya serius dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat dalam mengatasi masalah kabut asap ini," ujarnya Rabu (4/10).

Bahkan, imbuahnya, saat ini Malaysia telah mengeluhkan dampak kabut asap yang mengganggu aktivitas warga negeri jiran itu.

Menurutnya, kondisi tersebut juga akan memengaruhi dari sisi bisnis *lantan* wisatawan mancanegara di Riau juga berasal dari Malaysia.

"Dengan berlanjutnya kabut asap, hal ini pasti akan merugikan perusahaan *travel* dan para pelancong," katanya.

Oleh karena itu, dia berharap agar kabut asap dapat segera dikendalikan, dan tidak mengakibatkan pembatalan kunjungan wisatawan.

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Riau telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) dari pemerintah pusat.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau Edy Afrizal menjelaskan bahwa meskipun situasi karhutla di Riau saat ini terkendali, tetapi upaya TMC masih dianggap penting.

"Selain untuk membasahi lahan gambut agar terhindar dari kebakaran, hujan buatan juga diharapkan dapat mengatasi kabut asap yang sering melanda wilayah tersebut. Kami sudah mengajukan kembali pelaksanaan TMC. Kami berharap agar TMC dapat segera dijalankan di Riau," ujarnya Rabu (4/10).

Edy memandang bahwa Riau merupakan benteng terakhir agar kabut asap tak mengganggu ke negara tetangga.

"Kehadiran hujan di Riau akan membantu menahan kabut asap. Ini adalah langkah penting, karena Riau berfungsi sebagai benteng terakhir. Jika asap terus masuk ke Riau, risiko penyebaran ke negara tetangga akan meningkat."

Langkah berbeda ditunjukkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar).

Penjabat (PJ) Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin mengintruksikan agar pengawasan kawasan hutan diperketat guna mencegah meluasnya karhutla.

Menurutnya, bagi oknum yang lalai sehingga terjadi kebakaran hutan dan lahan akan dapat konsekuensi logis.

"Jadi intinya kekeringan kita sudah pantau dan kadang-kadang juga *kari* itu lahannya jauh. Sampai saat ini sudah terkendali. Polda dan BPBD, Pangdam turut mengawasi," katanya.

Data BPBD Jabar menunjukkan bahwa pada pekan ini ada sebanyak 21 kabupaten/kota terdampak karhutla. Selain itu, sebanyak 97 kecamatan dan 740 hektare (ha) lahan terkena karhutla.

Langkah serupa juga dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang yang bahkan secara resmi telah mengeluarkan Surat Edaran Wali Kota No. 441.7/4769/ DKK/2023.

Wali Kota Padang Hendri Septa meminta kepada seluruh pihak untuk tidak melakukan kegiatan pembakaran apapun yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara, seperti pembakaran sampah, ban, dan bentuk kegiatan pembakaran lainnya.

Ia juga mengimbau agar masyarakat menunda dan mengurangi aktivitas di luar ruangan atau rumah, terutama pada kelompok rentan, seperti bayi, balita, ibu hamil, dan orang lanjut usia.

"Jika pun tetap berada di luar ruangan, sangat disarankan menggunakan masker berstandar N95/KN95/KF94, sebagai upaya mengantisipasi dampak gangguan ISPA," katanya, Rabu (4/10).

kekeringan di sejumlah daerah.

Para petani di Desa Aur Duri Surantih, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, mulai dihadapkan pada situasi mengeringnya sawah, padahal saat ini telah memasuki musim tanam.

"Bibit padi sudah selayaknya untuk ditanam, tapi sawah mengering, tidak bisa untuk ditanam padi. Air yang ada di irigasi juga kering, yang kita harapkan hujan," kata petani Nofri kepada *Bisnis*, Selasa (3/10).

Dia menjelaskan, mengeringnya air sawah tersebut sudah terpantau terjadi sejak 2 pekan terakhir. Namun, kondisi makin parah pada beberapa hari terakhir yang ditandai dengan lumpur yang mulai keras.

Menurutnya, apabila kondisi lumpur sudah keras, maka sulit untuk ditanam padi. Jika pun mulai mengering, setidaknya lumpur sawah masih bisa untuk dicangkul, sehingga masih dengan mudah untuk ditanam padi.

Kini, Nofri bersama petani lainnya, tengah mengupayakan mengaliri air sawah dengan cara membuat sumur bor di lahan sawah tersebut. "Semoga ditemukan air, jadi kami bisa pula mulai masa tanam," katanya.

Kepala Balai Perlindungan Tanaman Pangan Dan Hortikultura (BPTPH) Sumbar Suardi menjelaskan bahwa daerah yang bakal terdampak El Nino a.l. Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat.

Di daerah itu, imbuahnya, sebagian besar sawah-sawahnya merupakan sawah tadah hujan sehingga perlu disiapkan pompa atau sumur tancap. "Jangka panjang perlu dipersiapkan embung di daerah-daerah tadah hujan, dan jangka pendeknya *pompanisasi* dan sumur tancap itu akan kita lakukan." (57/Peri Widarti/Nugroho Nafika Kassa) B

KEKERINGAN


Fenomena El Nino yang melanda Indonesia tidak hanya menyebabkan karhutla, tetapi juga bencana



Sumatra mendominasi luas lahan gambut di Indonesia pada 2019, disusul oleh Kalimantan, dan Papua.

Dokumentasi

BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMANTAN

Title	TINJAU STOK BERAS	 Kementerian Pertanian
Date	5 Oktober 2023	
Media	Bisnis Indonesia	
Page	3	
Author	Bisnis/Fauzan	

■ TINJAU STOK BERAS



Antara/Fauzan

Menteri BUMN Erick Thohir (*tengah*) bersama Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo (*kanan*) dan Dirut Perum Bulog Budi Waseso meninjau harga beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta, Rabu (4/10). Kunjungan tersebut bertujuan meninjau stok beras, stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) sekaligus pengecekan harga beras di PIBC.


Title	Babel Ekspor Pinang Ke India Dan China	
Date	5 Oktober 2023	
Media	Rakyat Merdeka	
Page	10	
Author	Rakyat Merdeka	

Babel Ekspor Pinang Ke India Dan China

PINANG dalam bentuk bahan mentah dari Kepulauan Bangka Belitung (Babel) diekspor ke beberapa negara seperti India dan China. Masing-masing negara mendapat kiriman 20 ton dan 17 ton.


Pinang yang berasal dari Pulau Bangka ini didapatkan dari lahan pertanian seluas 2000 Hektare (ha).

Biasanya, pinang yang dikirimkan ke India dan China merupakan bahan baku produksi kosmetik, pewarna dan obat-obatan untuk kebutuhan farmasi.

Title	PADAMKAN API	 Kementerian Pertanian
Date	5 Oktober 2023	
Media	Rakyat Merdeka	
Page	8	
Author	Rakyat Merdeka	



PADAMKAN API: Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan) Andi Nur Alam Syah (depan) ikut membantu upaya pemadaman kebakaran api di lahan di Desa Syamsudin Noer, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Rabu (4/10).

Title	PASAR MURAH	 Kementerian Pertanian
Date	5 Oktober 2023	
Media	Rakyat Merdeka	
Page	6	
Author	Antara/Andri Saputra/Spt	



ANTARA FOTO/ANDRI SAPUTRA/SPT


PASAR MURAH: Pedagang mempersiapkan kebutuhan bahan pokok untuk dijual dengan harga murah saat pasar murah di Taman Nukila, Kota Temate, Maluku Utara, Rabu (4/10). Pasar murah digelar Pemda setempat bekerja sama dengan Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku Utara, menjual sembako seperti bawang merah, bawang putih, cabai, beras medium dan minyak goreng dengan harga lebih murah dari pasaran, sehingga dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok sekaligus menstabilkan harga.

Title	SERAHKAN ALSINTAN	 Kementerian Pertanian
Date	5 Oktober 2023	
Media	Rakyat Merdeka	
Page	8	
Author	Antara/Basri Marzuki/aww	



ANTARA/BASRI MARZUKI/AWW

SERAHKAN ALSINTAN:
Wakil Presiden Ma'ruf Amin didampingi Menteri Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar (ketiga kiri), Gubernur Sulawesi Tengah Rusdi Mastura (kiri) dan Bupati Donggala Kasman Lassa (kanan) menyerahkan alat mesin pertanian (alsintan) secara simbolis di Desa Talaga, Kecamatan Dampelas, Donggala, Sulawesi Tengah, Rabu (4/10). Pemerintah memberikan bantuan kepada warga setempat sebanyak 122 unit alsintan dan 30 ton bibit jagung dan pupuk untuk pengolahan lahan seluas 1.124 hektare di Kawasan Pangan Nasional (KPN), yang baru diresmikannya di kawasan untuk mendukung ketersediaan pangan di Ibu Kota Negara.

Title	Waspada Kebakaran Hutan	 Kementerian Pertanian
Date	5 Oktober 2023	
Media	Rakyat Merdeka	
Page	8	
Author	KAL	

Musim Kemarau Belum Berakhir

Waspada Kebakaran Hutan

Senayan menyoroti maraknya kebakaran lahan dan hutan yang terjadi di berbagai wilayah. Pemerintah diminta bergerak cepat meredam kebakaran lahan saat kemarau panjang ini.

ANGGOTA Komisi IV DPR Daniel Johan prihatin atas peristiwa kebakaran lahan yang terjadi di sejumlah wilayah, di antaranya di kawasan hutan Kalsel. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan lainnya kudu bertindak cepat mengatasi kebakaran hutan ini.

Apalagi kebakaran lahan ini sangat berdampak kepada lingkungan dan kelestarian lingkungan, serta mengancam kelangsungan hidup manusia.

“Kesehatan Masyarakat, terutama anak-anak dapat terganggu karena bisa menyebabkan penyakit gangguan pernapasan. Aktivitas masyarakat

juga terganggu sehingga dapat menyebabkan kerugian ekonomi cukup besar,” kata Daniel, kemarin.

Anggota Fraksi PKB ini mengatakan, fenomena El Nino dan kemarau panjang ini membuat upaya penanganan kebakaran lahan dan hutan menjadi cukup sulit. Intensitas pemadaman melalui *water bombing* dan hujan buatan itu perlu ditingkatkan.

Dia pun memberikan apresiasi atas upaya keras yang telah dilakukan Pemerintah untuk memastikan kebakaran lahan ini tidak menyebabkan kerugian bagi masyarakat secara luas.

“Meski dalam keadaan terbatas, kita patut berterima kasih kepada pemadam kebakaran

dan pemerintah daerah telah berjabuk mengatasi kebakaran lahan dan hutan ini,” ujarnya.

Sementara, Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan) Andi Nur Alam Syah ikut turun langsung membantu pemadaman kebakaran lahan di Kalsel agar tidak meluas ke perkebunan kelapa sawit.

Upaya ini untuk mencegah kerugian lebih besar yang dapat dialami masyarakat terutama para petani mengingat saat ini terdapat sekitar 7.000 hektare lahan gambut yang mengalami kebakaran.

“Hari ini kami (Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan) bersama Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Pemerintah Provinsi Kalsel, TNI, Badan Penanggulangan Bencana Nasional dan Gapki (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) melakukan giat pemadaman kebakaran lahan gambut di Kalsel,” jelas Andi

saat meninjau sekaligus melakukan pemadaman kebakaran lahan di Desa Syamsudin Noer, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, kemarin.

Andi tidak ingin kebakaran lahan di Kalsel ini merambat ke lahan sawit. Untuk itu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkebunan Kementan, dengan tetap melalui koordinasi bersama dengan KLHK sebagai *leading sector* dalam penanganan kebakaran ini, memberikan dukungan agar kebakaran cepat padam dan tidak merambah lahan perkebunan sawit.

Dalam giat ini, pihaknya memberikan bantuan 10 unit pompa air untuk mempercepat pemadaman kebakaran lahan.

“Perkebunan sawit rakyat harus sedini mungkin kita selamatkan dari kebakaran, mengingat sawit Provinsi Kalsel salah satu penyumbang perekonomian,” sebut jebolan Teknik Pertanian Universitas Gajah Mada dan

Magister Teknik Kimia Institut Teknologi Bandung ini.

Pihaknya tidak henti-hentinya mengingatkan kepada seluruh *stakeholder* perkebunan untuk tetap waspada dan dapat mempersiapkan upaya-upaya pencegahan atau antisipasi.


Dengan begitu, hasil produksi atau hasil panen perkebunan tetap terjaga mutu dan kualitasnya, serta ketersediaan bahan baku aman terkendali.

Pada tahun 2022 dan 2023, Kementan memberikan bantuan sarana berupa 431 unit pompa pemadam kebakaran untuk Dinas Perkebunan Provinsi/Kabupaten serta KTPA (Kelompok Tani Peduli Api).

KTPA ini berada di daerah prioritas rawan terjadinya Karhutla. Yaitu di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. ■ KAL

Dokumentasi

BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMANTAN

Title	Distribusi Beras SPHP Libatkan Satgas Pangan	 Kementerian Pertanian
Date	5 Oktober 2023	
Media	Investor Daily	
Page	12	
Author	TI	


Distribusi Beras SPHP Libatkan Satgas Pangan

JAKARTA, ID—Menteri BUMN Erick Thohir memastikan beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) Perum Bulog di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) dalam posisi melimpah. Dalam proses distribusi beras SPHP itu dilibatkan Satgas Pangan. “Program SPHP harus diimbangi dengan penegakan hukum yang optimal sebagai langkah antisipasi penyalahgunaan stok. Kita libatkan semua jajaran, termasuk Satgas Pangan hingga masyarakat, guna mendorong harga dan ketersediaan pangan beras tetap terjaga,” kata Erick saat meninjau PIBC, Rabu (04/10/2023), guna menyikapi perkembangan harga beras saat ini.

Selain ke PIBC, Menteri Erick didampingi Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Parasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Budi Waseso juga meninjau Pasar Rawamangun, Jakarta Timur, guna memastikan ketersediaan dan pasokan beras dari Bulog pada kondisi aman dalam rangka stabilisasi harga melalui program operasi pasar atau SPHP. Menteri Erick beserta rombongan dalam kunjungan tersebut menyaksikan langsung stok beras SPHP di salah satu gudang penyimpanan beras di PIBC melimpah. Kunjungan juga dilakukan ke kios-kios pengecer beras di sekitar pasar.

Program SPHP yang tengah digalakkan merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang diinisiasi Bapanas sebagai langkah konkret penyelesaian permasalahan pangan di Indonesia. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menambahkan, program SPHP dilakukan di seluruh Indonesia guna mengantisipasi gejolak harga beras yang kini terjadi, terutama selama El Nino. “Masyarakat tidak perlu khawatir karena saat ini Bulog memiliki 1,7 juta ton beras yang bisa untuk menjaga ketersediaan, keterjangkauan, serta stabilisasi harga khususnya untuk disalurkan melalui program SPHP dan bantuan pangan beras tahap kedua bagi 21,35 juta keluarga penerima manfaat (KPM) pada September-November,” ujar Budi.

Kegiatan SPHP dimaksimalkan dengan penyerapan stok yang dilakukan Bulog sepanjang 2023. Hingga 3 Oktober 2023, Bulog telah berhasil menyerap 854.122 ton beras dari petani dalam negeri, ini tentu menguatkan stok yang kini dimiliki Bulog. Sebagai perusahaan umum yang bergerak di bidang pangan, Bulog akan terus berupaya memaksimalkan kinerja untuk menjaga ketersediaan, keterjangkauan, serta stabilisasi harga di tingkat produsen maupun konsumen. **(tl)**


Title	Kedelai Impor dari Amerika	 Kementerian Pertanian
Date	5 Oktober 2023	
Media	Investor Daily	
Page	12	
Author	Ant	



ANT

Kedelai Impor dari Amerika

Kapal bermuatan kedelai melakukan bongkar muat di Pelabuhan Tanjungwangi, Banyuwangi, Jawa Timur, Rabu (4/10/2023). Data Pelindo Multi Terminal Tanjungwangi menyebutkan sebanyak 8 ribu ton kedelai impor dari Amerika tersebut memulai proses bongkar di Pelabuhan Tanjungwangi.

Title	Pemerintah Galakkan TMC Tekan Kebakaran Hutan	 Kementerian Pertanian
Date	5 Oktober 2023	
Media	Investor Daily	
Page	12	
Author	TI	

Pemerintah Galakkan TMC Tekan Kebakaran Hutan

JAKARTA, ID—Pemerintah menggalakkan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) atau hujan buatan untuk menekan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi prioritas, yakni Kalimantan Barat (Kalbar), Kalimantan Selatan (Kalsel), Kalimantan Tengah (Kalteng), Sumatra Selatan (Sumsel), Riau, dan Jambi. Fenomena El Nino telah meningkatkan jumlah titik panas (*hotspot*), yang 80% berpotensi sebagai titik api (*firespot*), menjadi 6.659 titik per 2 Oktober 2023, tahun lalu hanya 1.128

titik.


Menurut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, seperti dipantau dari kanal media sosial Sekretariat Presiden, per 2 Oktober 2023, *hotspot* yang berpeluang menjadi *firespot* mencapai 6.659 titik. Angka itu lebih rendah dari 2015 yang mencapai 71 ribu titik dan 2019 sebanyak 29.300 titik, tapi lebih tinggi dari 2022 yang hanya 1.128 titik. Saat ini, areal yang terbakar sudah terekam 267 ribu hektare (ha), diperkirakan dengan situasi September dan

Oktober tahun ini kemungkinan angka itu masih akan bertambah. "Sejak 28 September, kita berjibaku di Sumsel, Kalteng, Kalsel, Kalbar, sambil memonitor Riau dan Jambi. Arahan Presiden, segera ditangani karena Kalteng sudah melandai tapi harus dijaga melalui pemadaman dan TMC. Kalsel, Sumsel, dan Jambi, menjadi prioritas karena ada potensi menyeberang, mudah-mudahan tidak, sejauh ini tidak ada *trans-boundary haze* ke Malaysia," papar Siti usai mengikuti Ratas Mitigasi

Dampak El Nino di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (03/10/2023). Penegakan hukum oleh Kepolisian RI juga dilakukan, kini sudah ada penetapan tersangka. Kementerian LHK juga telah memberikan peringatan bagi 144 perusahaan dan ada 23 perusahaan yang disegel areal terbakarnya yang antara lain berlokasi di Kalbar, Kalteng, dan Sumsel. "Ada perusahaan penanaman modal asing (PMA) dari Singapura, Malaysia juga ada," ujar Menteri Siti. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Suharyanto menambahkan, penanganan karhutla melalui operasi darat maupun udara difokuskan di enam provinsi prioritas, meski kebakaran gunung dan tempat pembuangan sampah juga dituntaskan. "Ketika daerah menetapkan status tanggap darurat dan meminta bantuan BNPB, kami kerahkan helikopter *water bombing*. Dan, hingga 3 Oktober 2023, telah dilakukan 244 kali TMC dengan garam yang disebar 341.580 kilogram, sudah hampir dua bulan terakhir TMC terus dilakukan di Riau, Kalbar, NTT,

Jawa Barat, Jambi, DKI Jakarta, Kalsel, dan Sumsel," kata dia. TMC dilaksanakan melalui koordinasi intensif dengan BMKG, Kementerian LHK, dan BRIN. TMC digelar berdasarkan pertumbuhan awan. "Hari-hari ke depan, TMC diarahkan ke Jambi, Kalteng, Sumsel, Kalsel, dan Riau," ujar dia. Khusus untuk operasi udara, BNPB telah mengerahkan 35 helikopter, yakni 13 helikopter patroli dan 22 helikopter *water bombing* yang diarahkan ke daerah yang kebakarannya besar. **(tl)**

Title	Stabil dan Terkendali, Inflasi Inti RI Terendah di Dunia	 Kementerian Pertanian
Date	5 Oktober 2023	
Media	Investor Daily	
Page	13	
Author	Arnoldus Kristianus dan Thomas E Harefa	

Stabil dan Terkendali, Inflasi Inti RI Terendah di Dunia

JAKARTA, ID – Inflasi Indonesia bulan September 2023 tetap terkendali pada rentang sasaran 3%±1 yaitu pada level 2,28% secara *year on year* (yoy). Sementara komponen inti mengalami inflasi sebesar 0,12% *month to month* (mtm) atau 2,00% (yoy) atau merupakan salah satu yang terendah di dunia.

Oleh **Arnoldus Kristianus** dan **Thomas E Harefa**

Berdasarkan catatan Trading Economics, realisasi inflasi inti Indonesia tersebut berada di peringkat 7 dari 83 negara. Secara tahunan, inflasi inti masih terjaga stabil dalam rentang target yaitu 3%±1 yang mengindikasikan daya beli masyarakat masih baik.

Pemerintah menyatakan pencapaian tersebut tidak terlepas dari koordinasi dan sinergi yang kuat berbagai pihak melalui TPIP-TPID dalam mengendalikan gejolak harga di tengah berbagai tantangan seperti kenaikan harga komoditas pangan dan energi global. Realisasi inflasi tersebut juga merupakan yang terendah sejak Februari 2022.

Capaian tersebut juga lebih baik dibandingkan realisasi inflasi sejumlah negara seperti Jepang (3,2% yoy), Korea Selatan (3,4% yoy), Vietnam (3,66% yoy), Amerika Serikat (3,7% yoy), Euro Area (4,3% yoy), Jerman (4,5% yoy), Brasil (4,61% yoy), Rusia (5,2% yoy), Inggris (6,7% yoy), India (6,83% yoy), Turki (58,94% yoy), dan Argentina (124% yoy).

"Pencapaian realisasi inflasi September 2023 didukung oleh inflasi *volatil food* (VF) yang terkendali, inflasi *administered prices* (AP) yang terus melandai dan inflasi *core/inti* yang terjaga stabil. Inflasi Indonesia relatif terkendali di tengah gejolak harga sejumlah komoditas pangan dan energi global serta adanya ancaman El Nino," jelas Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulis, Selasa (3/10/2023).

Perkembangan inflasi September 2023 dipengaruhi oleh pergerakan seluruh komponen inflasi. Di tengah tantangan kenaikan harga beras, inflasi VF masih terkendali di level 3,62%

(yoy) dan sesuai dengan rentang sasarannya yang disepakati dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (HLM TPIP) pada 20 Februari 2023 yakni kisaran 3% sampai dengan 5% (yoy).

Dia menjelaskan, pemerintah terus berupaya menjaga ketersediaan pasokan pangan di antaranya melalui penguatan cadangan pangan pemerintah khususnya beras. Penyaluran beras medium melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) terus dilaksanakan. Lebih lanjut, dalam rangka menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan, bantuan pangan beras kembali disalurkan kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Realisasi sampai dengan 1 Oktober 2023 yakni sebesar 98,37% dari total alokasi bulan September.

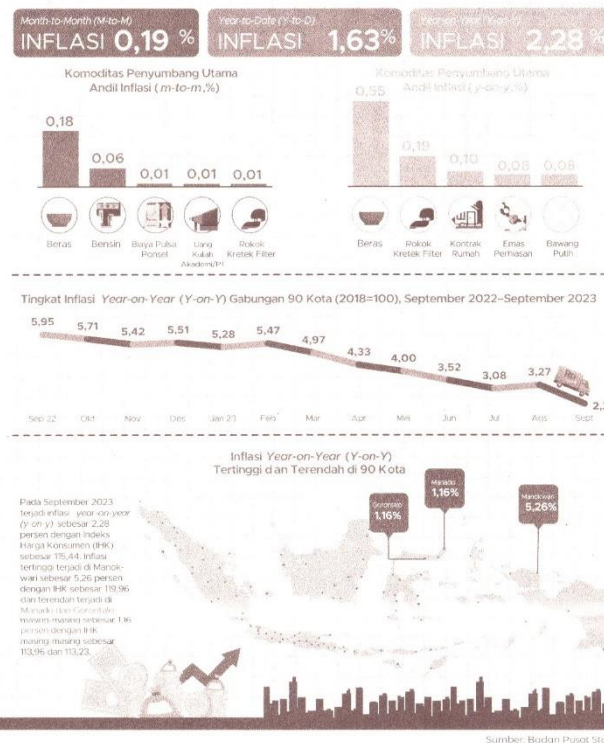
Komponen *administered prices* mengalami inflasi sebesar 0,23% (mtm) atau 1,99% (yoy). Rendahnya inflasi AP secara tahunan terjadi seiring hilangnya *base year effect* pada September 2022 yang mengalami peningkatan signifikan akibat penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM). "Ke depan, kita akan terus mewaspadai dan memonitor fenomena-fenomena domestik maupun global yang dapat berdampak terhadap inflasi. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi saat ini, komitmen dan sinergi bersama seluruh pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia akan terus diperkuat guna menjaga inflasi tetap stabil dan terkendali," pungkas Menko Airlangga.

Waspadai Harga Minyak

Senada, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu mengatakan penurunan inflasi di bulan September menjadi 2,28% (yoy) dari bulan Agustus yang tercatat 3,27%, didorong oleh perlambatan inflasi kompo-

PERKEMBANGAN INDEKS HARGA KONSUMEN SEPTEMBER 2023

Berita Resmi Statistik No. 62/10/Th. XXVI, 2 Oktober 2023



nen harga diatur pemerintah (*administered price*) dan inflasi inti. Inflasi komponen harga diatur pemerintah mengalami penurunan tajam sejalan dengan berakhirnya *base effect* penyesuaian harga BBM pada September 2022. "Meskipun demikian, tekanan terhadap harga BBM subsidi juga perlu diwaspadai seiring dengan tren kenaikan harga minyak

dunia akhir-akhir ini," kata Febrio.

Komponen inflasi harga *bergejolak* (*volatile food*) juga masih melanjutkan tren meningkat, terutama didorong oleh naiknya harga beras akibat dampak El Nino, yang tidak saja terjadi di Indonesia, tetapi melanda berbagai kawasan dunia. Inflasi komponen harga *bergejolak* mencapai 3,62% (yoy), naik


dari angka Agustus sebesar 2,42% (yoy). Dengan mempertimbangkan pergerakan harga yang masih meningkat, pemerintah secara cepat merespons dengan upaya menjaga kecukupan pasokan melalui impor beras. Presiden telah menginstruksikan penambahan impor beras sebesar 1 juta ton guna memperkuat cadangan beras nasional.

Upaya untuk menjaga stabilitas harga pangan lainnya juga dilakukan dengan berbagai kegiatan operasi pasar dan menggelar operasi murah di berbagai daerah. "Program bantuan pangan nontunai yang telah mulai digulirkan bulan ini juga diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat dan menahan kenaikan harga pangan" terang Febrio.

Sementara itu, ekonom Bank Danamon Irman Faiz memperkirakan inflasi umum akan mencapai sekitar 2,7% (yoy) pada Desember 2023. Hal ini tidak terlepas dari penyesuaian harga bahan bakar bersubsidi tahun 2022. Sementara itu, dampak El Nino terhadap harga bahan pangan domestik yang bergejolak diperkirakan tidak terlalu besar. "Selain itu, moderasi dalam biaya input manufaktur akan mendukung produsen dalam mempertahankan harga *output* mereka dalam waktu dekat," ucap Irman.

Irman menjelaskan, inflasi akan sedikit meningkat menjadi 2,9% pada 2024, namun angka ini masih berada dalam kisaran target BI sebesar 1,5%-3,5%. "Kondisi inflasi didorong oleh ekspektasi penurunan harga komoditas global dan terkendalinya inflasi biaya *input*," tutur Irman.

Mengenai inflasi pada September 2023 sebesar 2,28% secara tahunan, Irman mengatakan penurunan inflasi terutama disebabkan oleh komponen transportasi. Efek dasar kenaikan harga bahan bakar bersubsidi tahun 2022 menyebabkan berkurangnya kontribusi pertumbuhan secara tahunan (yoy) untuk komponen ini. "Sebaliknya, inflasi bahan pokok dan tembakau mempunyai peranan yang lebih besar terhadap inflasi, yaitu meningkat dari 0,9% menjadi 1,1% karena kenaikan kelompok pengeluaran harga beras dan cukai tembakau," pungkas dia.


Title	Wapres Berikan Bantuan Alsintan di Donggala	 Kementerian Pertanian
Date	5 Oktober 2023	
Media	Investor Daily	
Page	13	
Author	Antara	



Antara

Wapres Berikan Bantuan Alsintan di Donggala

Wakil Presiden Ma'ruf Amin (kedua kiri) didampingi Menteri Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar (tengah), Gubernur Sulteng Rusdi Mastura (kiri), dan Bupati Donggala Kasman Lassa (kanan) menyerahkan alat mesin pertanian (alsintan) secara simbolis di Desa Talaga, Kecamatan Dampelas, Donggala, Sulawesi Tengah, Rabu (4/10/2023). Pemerintah membantu warga setempat sebanyak 122 unit alsintan dan 30 ton bibit jagung dan pupuk untuk mengolah lahan seluas 1.124 hektare di Kawasan Pangan Nasional (KPN) yang baru diresmikannya di kawasan untuk mendukung ketersediaan pangan di Ibu Kota Negara .

Title	Harga Beras dan Gula di Jateng Picu Inflasi	
Date	5 Oktober 2023	
Media	Kompas	
Page	11	
Author	XTI	

Harga Beras dan Gula di Jateng Picu Inflasi

SEMARANG — Harga beras dan gula di sejumlah daerah di Jawa Tengah jauh di atas harga acuan pemerintah. Fenomena itu ikut memicu kenaikan inflasi di Jateng selama September 2023. "Penyebab utama inflasi di Jateng pada September 2023 adalah kenaikan harga sejumlah komoditas, yakni beras dengan andil inflasi 0,34 persen, bensin (0,08 persen), angkutan udara (0,04 persen), biaya pulsa ponsel, serta gula pasir yang memberikan andil masing-masing 0,01 persen," kata Kepala BPS Jateng Dadang Hardiwan, Rabu (4/10/2023). (XTI)

Title	Stok Berlimpah, India Pangkas Impor CPO
Date	5 Oktober 2023
Media	Kompas
Page	4
Author	AFP/REUTERS/AGP/JOS



KEMENTERIAN PERTANIAN

Stok Berlimpah, India Pangkas Impor CPO

Produsen global minyak kelapa sawit mentah atau CPO kembali mendapat tantangan baru. Upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan ekspor ke pasar alternatif.

JAKARTA, KOMPAS — Dengan stok yang masih berlimpah, pada September lalu India memangkas impor minyak nabati hingga 19 persen dibandingkan dengan impor pada Agustus.

"Persediaan minyak nabati telah mencapai tingkat tertinggi sepanjang masa karena rekor impor pada bulan Juli dan Agustus," kata Rajesh Patel dari GGN Research, sebuah lembaga penelitian di bidang industri pertanian di India, Rabu (4/10/2023). "Itulah alasan mengapa importir minyak nabati melakukan jeda pembelian saat ini".

Menurut Solvent Extractors' Association of India (SEA), sebuah asosiasi perdagangan minyak nabati India, stok minyak nabati India saat ini mencapai lebih dari 3,7 juta ton. Pada September tahun lalu, stok minyak nabati India hanya 2,4 juta ton.

Pemangkasan volume impor itu diduga bakal memengaruhi pasokan minyak nabati global dan berdampak pada harga komoditas tersebut. Yang patut diperhatikan adalah sebagian besar minyak nabati yang diimpor India merupakan minyak kelapa sawit mentah (*crude palm oil/CPO*). Apabila dibandingkan dengan pembelian pada Agustus, impor minyak sawit India pada September pun terpengkas hingga 26 persen menjadi 830.000 ton.

Saat ini India mengimpor CPO asal Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Selain itu, India juga mengimpor minyak kedelai dan minyak bunga matahari dari Argentina, Brasil, Rusia, dan Ukraina. Seperti terjadi pada impor minyak kelapa sawit, impor minyak bunga matahari India pada September tercatat turun hingga 15 persen, menjadi hanya 310.000 ton.

Sebelum memangkas volume impor tersebut, India pada Juli lalu karena faktor cuaca dan untuk menyambut sejumlah festival keagamaan "memumpuk" pasokan minyak nabati.

"Hal ini menyebabkan permintaan impor lebih tinggi pada bulan Juli dan Agustus menjelang hari raya," kata Ashwini Bansod, kepala penelitian komoditas di Phillip Capital India Pvt Ltd.

Pemangkasan volume impor itu berbeda dari prakiraan awal September lalu. Dikutip dari kantor berita Reuters, Rabu (6/9/2023), CEO Patanjali Foods Ltd memprediksikan impor minyak nabati India pada



KOMPAS/ZULKARNAINI

Pekerja menimbang tandan kelapa sawit, di Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur, Selasa (25/7/2023). Para buruh menjadi andalan bagi perusahaan untuk kelancaran produksi perusahaan. Industri sawit nasional saat ini mendapat banyak tantangan, di antaranya Undang-Undang Bebas Deforestasi Uni Eropa dan pemangkasan volume impor minyak kelapa sawit mentah oleh India.

September dan Oktober akan meningkat, terutama dipicu oleh sejumlah perayaan keagamaan.

Kala itu diprakirakan, India akan mengimpor total 1,8 juta ton pada September dan Oktober. Apabila prakiraan tersebut terwujud, total impor minyak nabati India untuk tahun pemasaran 2022-2023 akan berakhir pada 31 Oktober.

Sejauh ini, dalam 10 bulan pertama tahun pemasaran 2022-2023, India telah mengimpor 14 juta ton minyak nabati. Rincian impor minyak nabati itu adalah 8,2 juta ton CPO; 3,2 juta ton minyak kedelai; dan 2,5 juta ton minyak bunga matahari. Sebagai catatan, dua pertiga kebutuhan minyak nabati India dipenuhi melalui impor.

Posisi Indonesia

Secara terpisah, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan, India masih akan tetap membutuhkan pasokan impor CPO un-

tuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hanya saja, produksi minyak nabati India sedang naik sehingga dalam beberapa waktu kemungkinan akan mengurangi impor CPO.

"Sepertinya pengurangan impor dari India tak berpengaruh signifikan pada ekspor CPO Indonesia karena sampai sekarang impor masih jalan. Kalau sampai sekarang mereka (India) masih impor, tidak total berhenti," ujarnya saat dihubungi, Rabu (4/10), dari Jakarta.

Eddy menambahkan, India memproyeksikan produksi minyak nabati mereka tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal ini disampaikan dalam konferensi Globaloil India 2023 di Mumbai, India.

Gapki melaporkan, ekspor CPO pada Juli 2023 mencapai 589.000 ton atau naik 16,9 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Sementara secara kalender berjalan hingga Juli 2023, ekspor dengan negara tujuan India lebih tinggi 87 persen

dari total ekspor pada 2022.

Tantangan

Di sisi lain, pemangkasan volume impor minyak nabati—termasuk CPO—oleh India bukan satu-satunya tantangan yang saat ini dihadapi produsen CPO global. Sebagai produsen utama minyak sawit dunia, Indonesia dan Malaysia dihadapkan pula pada tantangan alam, seperti El Nino dan pembatasan baru yang dikenakan Uni Eropa terkait isu deforestasi.

Undang-Undang Bebas Deforestasi Uni Eropa (EUDR) itu dinilai diskriminatif dan dianggap bakal menghambat perdagangan. Bagi Indonesia dan Malaysia, regulasi tersebut juga diyakini akan berdampak langsung pada petani sawit, kakao, dan kopi. Padahal, komoditas tersebut justru dapat menjadi solusi atas isu penggundulan hutan yang menjadi dasar EUDR (Kompas.id, 2 Agustus 2023).

Menyikapi tantangan tersebut, pekan lalu, Menteri Perkebunan dan Komoditas Malaysia

Fadillah Yusof kepada kantor berita AFP mengatakan, Malaysia kini tengah mengincar pasar China. Malaysia akan meningkatkan ekspor CPO ke China sebesar 500.000 ton per tahun.

"Impor minyak mentah kelapa sawit dan produk berbasis dasar sawit China dari Malaysia sebesar 3,14 juta ton pada tahun 2022," kata Fadillah. Jumlah tersebut akan meningkat pada akhir tahun ini atau awal tahun depan dengan adanya tambahan penyerapan sebesar 500.000 ton minyak sawit oleh Beijing.


Peningkatan ini merupakan hasil kesepakatan antara perusahaan produk CPO yang ber-kantor pusat di Malaysia, Sime Darby Oils International, dan Guangxi Beibu Gulf International Port Group milik Pemerintah China. "Importir China membeli produk hilir sawit bernilai tambah tinggi yang diproduksi dari Malaysia," kata Fadillah.

Ekspor CPO Malaysia ke China diprakirakan akan mencapai 3,2 juta ton pada 2023.

(AFP/REUTERS/AGP/JOS)

Dokumentasi

BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTERIAN

Title	Beli Beras Dibatasi 10 Kg Per Hari	 Kementerian Pertanian
Date	5 Oktober 2023	
Media	Jawa Pos	
Page	8 Part 1	
Author	Ygl/bry/mim/agf/wan/mia/idr/sha/c6/fal	


Beli Beras Dibatasi 10 Kg Per Hari

- Khusus Yang Digelontorkan Bulog, Berlaku di Ritel Modern
- Pastikan Distribusi Adil, Jamin Tidak Ada Kelangkaan

JAKARTA - Pembatasan pembelian beras diberlakukan seiring dengan persediaan yang terus berkurang. Yakni, maksimal 10

kilogram per hari atau dua pak. Kebijakan tersebut terutama berlaku di toko ritel modern ■

*Baca **Beli...** Hal 7*

Title	Beli Beras Dibatasi 10 Kg Per Hari	 Kementerian Pertanian
Date	5 Oktober 2023	
Media	Jawa Pos	
Page	8 Part 2	
Author	Ygl/bry/mim/agf/wan/mia/idr/sha/c6/fal	

Beli Beras Dibatasi 10 Kg Per Hari

Sambungan dari hal 1

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey mengonfirmasi adanya pembatasan jumlah beras yang dapat dibeli di toko ritel. Badan Pangan Nasional (Bapanas), kata dia, menetapkan pembatasan tersebut untuk memastikan distribusi beras yang adil kepada konsumen. "Selain beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) pemerintah, pembatasan pembelian dipukul rata untuk semua jenis beras, termasuk beras premium. Maksimal dua pak beras dapat dibeli pelanggan ritel setiap hari," ujar Roy kemarin.

Pembatasan itu dibuat karena kekeringan panjang di banyak daerah yang mengakibatkan pasokan beras menurun. Di sisi lain, pemerintah berharap penyerapan beras bisa merata untuk masyarakat. "Sebagian besar beras yang dijual saat ini adalah stok lama yang masih digunakan dengan harga lama. Oleh karena itu, pembatasan pembelian dibuat untuk menciptakan keadilan sosial dan menghentikan penimbunan," paparnya.

Meski stok beras tidak melimpah, pihaknya cukup yakin tidak akan terjadi kelangkaan beras. Namun, pembelian beras masih akan dibatasi sampai pasokan cukup dan harga kembali normal. "Stok masih banyak tersedia sehingga masyarakat tidak perlu panik. Kita harus optimis bahwa beras tidak akan langka," tegasnya.

Corporate Communication Alfamidi Retriantina membenarkan adanya pembatasan dalam pembelian beras di seluruh Alfamidi. Pembatasan itu dilakukan sejak bulan lalu. "Di Alfamidi pembatasannya 2 pcs per

konsumen per hari. Untuk beratnya bebas, yang penting 2 pcs," katanya kemarin.

Dia belum bisa memastikan sampai kapan pembatasan itu berlaku. Termasuk apakah pembatasan hanya berlaku di Alfamidi wilayah tertentu seperti Jabodetabek atau seluruh Indonesia.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) angkat bicara mengenai pembatasan pembelian beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) yang digelontorkan Perum Bulog. YLKI sepakat dengan pembatasan pembelian maksimal 10 kg per hari yang dilakukan ritel modern. "Pembatasan ditujukan menghindari pembelian besar-besaran oleh oknum pedagang dengan maksud dijual kembali dengan harga lebih tinggi," ujar pengurus harian YLKI Agus Sujatno.

Pembatasan pembelian beras SPHP itu pun dinilai tidak akan banyak memengaruhi rumah tangga. Jumlah 10 kg per hari dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan beras rumah tangga karena bukan untuk kegiatan usaha. "Secara teoretis, 10 kilogram per hari per keluarga merupakan jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan harian," ungkapnya.

Karena itu, dia berharap masyarakat tidak melakukan aksi *panic buying* merespons kebijakan tersebut. Mengingat, kebijakan itu bertujuan untuk pemerataan distribusi beras kepada masyarakat. "Kalau terjadi *panic buying* di masyarakat justru akan merugikan kelompok konsumen tertentu," tuturnya.

Dia meminta pemerintah lebih aktif menyosialisasikan kebijakan pembatasan pembelian beras SPHP maksimal 10 kilogram per hari tersebut.

Sementara itu, dalam pandangan Wakil Presiden Ke-10

dan Ke-12 Jusuf Kalla (JK), sulit mengurangi konsumsi beras lantaran telah menjadi makanan pokok. "Meskipun dibatasi," katanya sesuai pembukaan Konferensi Agama dan Perubahan Iklim Asia Tenggara yang digelar Majelis Hukama Muslimin (MHM) di Jakarta kemarin.

JK mengatakan, yang terpenting adalah menjaga pasokan atau suplai beras. Menurut dia, saat ini tidak hanya Indonesia yang mengalami masalah stok beras. Banyak negara lain yang mengalami masalah serupa. Bahkan, di Malaysia dika-barkan sudah terjadi *panic buying* beras.

Kebijakan di Malaysia

Pemerintah Malaysia berusaha mencari solusi permanen untuk mengatasi kenaikan harga beras yang terus melejit. Wakil Menteri Pertanian dan Ketahanan Pangan Malaysia Chan Foong Hin mengungkapkan, pihaknya akan meminta negara-negara ASEAN yang menjadi pemasok beras utama untuk memprioritaskan anggota blok tersebut.

Rencananya, Malaysia akan membicarakan masalah pasokan beras dengan Thailand dan Vietnam dalam pertemuan para menteri pertanian ASEAN yang digelar di Kuala Lumpur pekan ini. Thailand dan Vietnam merupakan eksportir beras terbesar kedua dan ketiga di dunia setelah India. "Pada sesi bilateral, kami akan mengangkat masalah ini. Kami ingin lebih mempererat hubungan kedua negara sehingga prioritas diberikan pada ekspor beras ke negara-negara ASEAN," ujar Chan kemarin (4/10) seperti dikutip *Bermama*.

Malaysia merupakan salah satu negara yang terkena dampak pembatasan ekspor

yang dilakukan para penghasil beras seperti India. Malaysia mengimpor sekitar 38 persen kebutuhan berasnya. Karena adanya pembatasan, harga beras impor di Malaysia naik hingga 36 persen dan memicu penduduk untuk menimbun beras varian lokal yang harganya lebih murah. Pemerintah mengatur batas atas harga jual untuk beras lokal, tapi tidak dengan beras impor.


Situasi yang berkebalikan terjadi di Filipina. Kemarin Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menyatakan telah mencabut batasan harga beras dalam negeri yang diberlakukan sejak 5 September lalu. Saat itu pemerintah menetapkan harga jual tertinggi untuk mengendalikan lonjakan harga bahan pokok. Selain itu, untuk mengatasi penimbunan beras yang dilakukan oleh para pedagang.

Penghapusan kebijakan itu dilakukan setelah terjadi penurunan harga beras domestik. Berdasar pantauan departemen pertanian, sejak kebijakan batasan harga diterapkan hingga pencabutan, ada penurunan harga hingga 15 persen. Pasokan beras di Filipina telah meningkat karena para petani mulai melakukan panen pada bulan lalu. Selain itu, harga biji-bijian di Asia telah turun dalam beberapa minggu terakhir setelah mencapai level tertinggi dalam hampir 15 tahun pada Agustus lalu. Kekhawatiran akan terbatasnya pasokan mulai mereda, setidaknya di Filipina.

Beberapa hari sebelumnya, pemerintah Filipina menyatakan akan memberikan bantuan keuangan sebesar PHP 12,7 miliar (Rp 3,5 triliun) kepada sekitar 2,3 juta petani padi. Subsidi itu ditujukan untuk membantu mereka

mengatasi El Nino dan biaya produksi yang lebih tinggi. Sementara itu, harapan bahwa India akan membuka ekspor berasnya kian tipis. Sebab, India mengalami musim panas yang luar biasa kering tahun ini. Pemerintah India mengatakan, Agustus tahun ini merupakan bulan Agustus terkecil sejak 1901. Berdasar data Departemen Meteorologi India (IMD), Agustus lalu negara tersebut menerima curah hujan 36 persen lebih sedikit

dari biasanya. Musim hujan di India berlangsung dari Juni-September. Air hujan biasanya dipakai untuk mengairi tanaman dan mengisi waduk. (ygl/bry/mim/agf/wan/mia/idr/sha/c6/fal)

Title	Pakai Pupuk Organik, Tanah Makin Subur	 Kementerian Pertanian
Date	5 Oktober 2023	
Media	Jawa Pos	
Page	11	
Author	Als/rya/c12/wir	



Pupuk itu subsidiya kurang, makanya kami ajak mereka untuk pindah ke organik dan petani setuju. Cuma memang harus pelan-pelan. Jadi, kalau sudah masuk masa tanam, masa pemupukan, kami turunkan tim.”

GANJAR PRANOWO



HUMAS PEMPROV JATENG

Pakai Pupuk Organik, Tanah Makin Subur

IMBAUAN Ganjar Pranowo agar petani beralih ke pupuk organik disambut antusias para petani. Contohnya, petani bawang merah di Brebes yang beralih menggunakan pupuk organik justru semakin untung. Selain tanahnya subur, produktivitasnya meningkat 30 persen.

Penyuluh pertanian di Kecamatan Brebes Hery Priyono menyatakan, sebelumnya banyak lahan pertanian di Brebes yang rusak karena penggunaan pupuk dan pestisida kimia yang berlebihan. Karena itu, ajakan Ganjar agar menggunakan pupuk organik ditindaklanjuti petani dengan mengikutsertakan delapan kelompok tani dari delapan desa.

‘Kedatangan Pak Ganjar Pranowo tahun lalu dalam rangka pemulihan penyehatan lahan kami tindak lanjuti. Kami lalu belajar bioremediasi atau penyehatan lahan garapan,’ tuturnya, Rabu (21/6).

Hasilnya, dalam kurun waktu setahun belakangan, petani mulai merasakan perubahan pada kondisi tanah. Kini setelah mendapatkan perlakuan semiorganik dengan pupuk dan

pestisida alami, serta mengurangi penggunaan produk kimia, tanah garapan lebih sehat.

“Selama setahun ini, mereka menyadari bahwa dari dua sampai tiga kali panen, produksi juga meningkat. Panen di Desa Wangen Dalem bisa menghasilkan 13,6 ton bawang merah. Sementara yang biasa (pakai kimia, Red) hanya 9-11 ton,” bebernya.

Ketua Gapoktan Unggul Makmur, Desa Krasak, Wiyono mengakui hal itu. Namun, dia mengakui penggunaan pupuk organik memang belum 100 persen. Pupuk organik masih dikombinasikan dengan pupuk kimia. Terutama jika serangan hama meng-gila. “Kalau saya dulu pakai kimia *full* itu, per musim tanam butuh sekitar Rp 10 juta. Nah, kalau (dipadukan) pakai pupuk organik, sekitar Rp 7 juta. Kini bawang yang dihasilkan pun cenderung lebih besar. Panennya dulu 1,5 ton, sekarang bisa 1,8 ton sampai 2 ton,” terangnya.

Ganjar Pranowo memang menyaran-kan petani bawang di Brebes beralih ke pupuk organik guna mengembalikan kesuburan tanah.


“Pupuk itu subsidiya kurang, makanya kami ajak mereka untuk pindah ke organik dan petani setuju. Cuma memang harus pelan-pelan. Jadi, kalau sudah masuk masa tanam, masa pemupukan, kami turunkan tim,” kata Ganjar saat itu.

Atas keberhasilannya tersebut, Kementerian Pertanian RI menilai Ganjar Pranowo berhasil menjalankan program peningkatan kesejahteraan petani di Jawa Tengah. Untuk itu, Ganjar diusulkan menerima dua tanda kehormatan, yakni gelar tanda kehormatan (GTK) Satyalencana Pembangunan dan Wira Karya.

Penyuluh lingkungan hidup, Seksi Pengolahan Sampah Bidang Kebersihan dan Kemitraan, DLHK Kota Depok, Anak Agung Made Sukartini menilai warga Depok memiliki minat tinggi terhadap pupuk organik. Hal itu nampak dalam pembagian pupuk organik gratis dari Pemkot Depok beberapa waktu lalu. “Sebanyak 1.900 kantong pupuk organik berat lima kilogram yang kami sediakan di enam lokasi langsung habis diserbu warga,” sebutnya. (als/rya/c12/wir)

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMANTAN**

Title	Panen Meningkatkan 30 Persen setelah Pakai Pupuk Organik	 Kementerian Pertanian
Date	5 Oktober 2023	
Media	Jawa Pos	
Page	8	
Author	Als/c12/wir	

Panen Meningkatkan 30 Persen setelah Pakai Pupuk Organik

IMBAUAN Ganjar Pranowo agar petani beralih ke pupuk organik disambut antusias para petani. Contohnya, petani bawang merah di Brebes yang beralih menggunakan pupuk organik justru semakin untung. Selain tanahnya subur, produktivitasnya meningkat 30 persen.

Penyuluh pertanian di Kecamatan Brebes Hery Priyono menyatakan, sebelumnya banyak lahan pertanian di Brebes yang rusak karena penggunaan pupuk dan pestisida kimia yang berlebihan. Karena itu, ajakan Ganjar agar menggunakan pupuk organik ditindaklanjuti petani dengan mengikutsertakan delapan kelompok tani dari delapan desa.

'Kedatangan Pak Ganjar Pranowo tahun lalu dalam rangka pemulihan penyehatan lahan kami tindak lanjuti. Kami lalu belajar bioremediasi atau penyehatan lahan garapan,' tuturnya, Rabu (21/6).

Hasilnya, dalam kurun waktu setahun belakangan, petani mulai merasakan perubahan pada kondisi tanah. Kini setelah mendapatkan perlakuan semiorganik dengan pupuk dan pestisida alami, serta mengurangi penggunaan produk kimia, tanah garapan lebih sehat.

"Selama setahun ini, mereka menyadari bahwa dari dua sampai tiga kali panen, produksi juga meningkat. Panen di Desa Wangen Dalem bisa menghasilkan 13,6 ton bawang merah.



HUMAS PEMPROV JATENG

MAKIN UNTUNG: Petani bawang merah di Brebes merasakan tanahnya subur dan produktivitasnya meningkat 30 persen setelah menggunakan pupuk organik.

Sementara yang biasa (pakai kimia, Red) hanya 9-11 ton," bebernya.


Ketua Gapoktan Unggul Makmur, Desa Krasak, Wiyono mengakui hal itu. Namun, dia mengakui penggunaan pupuk organik memang belum 100 persen. Pupuk organik masih dikombinasikan dengan pupuk kimia. Terutama jika serangan hama menggila.

"Kalau saya dulu pakai kimia *full* itu, per musim tanam butuh sekitar Rp 10 juta. Nah, kalau (dipadukan) pakai pupuk organik, sekitar Rp 7 juta. Kini bawang yang dihasilkan pun cenderung lebih besar. Panennya dulu 1,5 ton, sekarang bisa 1,8 ton sampai 2 ton," terangnya.

Ganjar Pranowo memang menyay-

rakan petani bawang di Brebes beralih ke pupuk organik guna mengembalikan kesuburan tanah. "Pupuk itu subsidiya kurang, makanya kami ajak mereka untuk pindah ke organik dan petani setuju. Cuma memang harus pelan-pelan. Jadi, kalau sudah masuk masa tanam, masa pemupukan, kami turunkan tim," kata Ganjar saat itu.

Atas keberhasilannya tersebut, Kementerian Pertanian RI menilai Ganjar Pranowo berhasil menjalankan program peningkatan kesejahteraan petani di Jawa Tengah. Untuk itu, Ganjar diusulkan menerima dua tanda kehormatan, yakni gelar tanda kehormatan (GTK) Satyalencana Pembangunan dan Wira Karya. **(als/c12/wir)**

Title	Warga Jenawi Kekurangan Air Bersih	 Kementerian Pertanian
Date	5 Oktober 2023	
Media	Jawa Pos	
Page	6	
Author	Rud/dri	

Warga Jenawi Kekurangan Air Bersih

Terdampak Kebakaran Puncak Gunung Lawu

KARANGANYAR - Warga di Dusun Babar dan Cetho, Desa/Kecamatan Jenawi, Karanganyar, mulai merasakan dampak kebakaran di kawasan puncak Gunung Lawu. Selain menghanguskan hutan, kebakaran tersebut telah memutus sejumlah pipa air bersih yang tersalur ke warga Jenawi.

"Ada sekitar 130 KK di dua dusun itu yang terdampak. Saat ini air sangat terbatas," kata Kepala Dusun Ceto Wardo kepada *Jawa Pos*

Radar Solo kemarin (4/10).

Dia menceritakan, selain untuk kebutuhan air minum, saluran air itu juga digunakan warga untuk mengairi lahan pertanian.

Kebakaran Gunung Lawu juga mulai menimbulkan polusi udara. Yang sangat merasakan adalah warga yang mencari rumput di kawasan perbukitan.

"Di bawah lokasi kebakaran itu, asap masih tebal. Biasanya warga mencari rumput di situ. Saat ini mereka mencari pakan seadanya di dekat-dekat area perkampungan," ungkapnya. (rud/dri)



RUDI HARTONO/JAWA POS RADAR SOLO

TERDAMPAK: Warga Desa Jenawi tetap beraktivitas di tengah kebakaran hutan di puncak Gunung Lawu kemarin (4/10).

Title	Kopi Rakyat Indonesia
Date	5 Oktober 2023
Media	Koran Kontan
Page	12
Author	Koran Kontan



Kementerian Pertanian

Kopi Rakyat Indonesia

Indonesia adalah produsen kopi terbesar keempat di dunia, dengan produksi mencapai hampir 795.000 ton pada 2022. Bukan hanya kuantitas yang terus meningkat, kopi Indonesia sudah terkenal di dunia sebagai kopi dengan kualitas tertinggi.

Sejak abad 18, tempat-tempat pelelangan kopi di dunia telah dikejutkan oleh kopi Indonesia yang sangat nikmat, sehingga terus mendapatkan harga yang tinggi.

Sebagian besar produksi kopi Indonesia berasal dari pertanian rakyat, yang dikelola oleh petani kecil dengan luas lahan yang relatif terbatas. Ini membuat tantangan yang khas bagi siapapun yang ingin meningkatkan produktivitas, kualitas, serta kelestarian lingkungan di perkebunan kopi rakyat yang tersebar di seluruh Indonesia. Kombinasi seluruh tantangan itu sangatlah mengancam keberlanjutan kopi Indonesia.

Dari sudut pandang sosial ekonomi, tantangan utama yang dihadapi pertanian dan industri kopi rakyat adalah kemiskinan. Sebagian besar petani kopi rakyat memiliki pendapatan rendah, sehingga mereka sulit berinvestasi dalam praktik pertanian yang berkelanjutan. Kemiskinan para petani kopi tidak berdiri sendiri. Ia adalah hasil dari sistem ekonomi kapitalistik yang menempatkan hasil pertanian di posisi harga rendah, walau produk lanjutannya berharga selangit.

Para petani kopi yang dengan terpaksa menerima



Jalal,
Pendiri dan Komisaris
Perusahaan Sosial WISESA



Noviansyah Manap,
Direktur Eksekutif, A+ CSR
Indonesia

harga jual produknya yang rendah menjadikan diri mereka kerap tak bisa berkelit dari jeratan rentenir, yang kerap bertindak sebagai pembeli itu, ketika membutuhkan pinjaman untuk beragam keperluan. Harga jual rendah, dikombinasikan dengan bunga pinjaman selangit, menjadi lingkaran setan kemiskinan.

Lingkaran itu kemudian menjadi semakin menjerat, ketika tantangan lingkungan juga hadir. Kemiskinan membuat investasi di pertanian berkelanjutan menjadi sulit, kalau bukan mustahil. Perubahan iklim, degradasi lahan, dan erosi adalah beberapa tantangan lingkungan yang dihadapi petani kopi rakyat di seluruh Indonesia.

Perubahan iklim dapat menyebabkan perubahan pola curah hujan, yang dapat berdampak pada pertumbuhan dan produksi kopi. Degradasi lahan dan erosi dapat menurunkan kesuburan tanah, sehingga dapat menurunkan produktivitas kopi.

berkelanjutan. Ini mengandaikan adanya pihak ketiga yang memiliki pengetahuan teknis untuk mengajarkannya, dengan sumberdaya dari luar.

Kedua, peningkatan akses petani kopi terhadap teknologi, termasuk peralatan, yang dibutuhkan untuk menerapkan praktik pertanian berkelanjutan. Penyuluhan dan pelatihan memang bisa meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Namun, implementasi jelas membutuhkan dukungan teknologi tepat guna yang bisa diakses petani kopi di kebun-kebun mereka. Kalau untuk mengaksesnya diperlukan modal, maka bantuan permodalan juga keniscayaan. Ini sekaligus diperlukan untuk memutus ketergantungan mereka terhadap para rentenir.

Ketiga, peningkatan akses atas pasar yang bisa membayar harga yang pantas untuk kopi yang diproduksi secara berkelanjutan. Harga yang baik bisa membuat petani terus termotivasi melakukan pertanian berkelanjutan, dan pada gilirannya menjaga dan meningkatkan produktivitas dan kualitas kopi yang mereka hasilkan. Untuk bisa mengaksesnya, bukan saja bantuan koneksi yang dibutuhkan, tapi juga bimbingan dalam pascapanen, penanganan, hingga seluruh aspek pemasaran.

Keseluruhan hal tersebut hanya bisa diwujudkan apabila para pemangku kepentingan benar-benar mau bekerja sama dalam meningkatkan keberlanjutan kopi rakyat Indonesia.

Pertanian regeneratif yang cerdas iklim, dapat menyuburkan lahan, dan mencegah erosi sesungguhnya sangat mungkin dilakukan, bila sumberdaya finansial dan insani para petani kopi bisa ditingkatkan. Namun, di situ pula tantangan besarnya.


Petani kopi rakyat sering kali memiliki keterbatasan pengetahuan dan keterampilan dalam menerapkan praktik-praktik tersebut. Selain itu, petani kopi rakyat juga sering tidak memiliki akses terhadap teknologi dan peralatan yang diperlukan untuk menerapkan praktik pertanian berkelanjutan.

Para pakar dan aktivis pertanian berkelanjutan telah mengidentifikasi cara-cara yang mangkus dan sangkil untuk mengatasi beragam tantangan itu. Pertama, peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani kopi perlu dilakukan terlebih dahulu. Petani kopi rakyat perlu diberikan penyuluhan dan pelatihan tentang praktik pertanian

Pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil perlu bahu membahu mencapai tujuan itu. Kerjasama dengan organisasi asing yang memromosikan keberlanjutan kopi dan perdagangan yang adil sangatlah penting. ■

Dokumentasi

BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMANTAN

Title	Sang Hyang Pasok Benih Padi Bantuan Pemerintah	
Date	5 Oktober 2023	
Media	Koran Kontan	
Page	13	
Author	Diki Masrdiansyah	

Sang Hyang Pasok Benih Padi Bantuan Pemerintah


JAKARTA. PT Sang Hyang Seri, anggota BUMN Klaster Pangan ID FOOD telah memasok benih padi kaya nutrisi varietas Inpari IR Nutrizinc sebanyak 424 ton hingga triwulan III-2023.

Distribusi benih itu untuk memenuhi kebutuhan lahan pertanian padi seluas 16.964 hektare (ha) di delapan provinsi. Direktur Utama PT Sang Hyang Seri, Adhi Cahyono Nugroho mengatakan, pasokan benih disalurkan langsung ke para petani yang diajukan oleh Kementerian Pertanian dan Dinas Pertanian Daerah melalui program e-Katalog Benih Padi dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Adapun delapan provinsi tersebut adalah Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, NTB, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. "Kami optimistis akan mendapatkan lebih banyak kepercayaan dari para konsumen, khususnya Kementerian Pertanian dan Dinas Pertanian Daerah mengingat kepuasan para petani yang menggunakan produk ini dinilai cukup baik," kata Adhi, Rabu (4/10).

Menurutnya, untuk memenuhi kebutuhan benih padi bantuan pemerintah melalui e-Katalog, PT Sang Hyang Seri tidak mendapatkan *privilege*. Ia mengaku, Sang Hyang Seri bersaing dengan produsen lain yang terdaftar di e-Katalog Benih Padi Kemtan, baik dari sisi harga, kualitas, pelayanan dan kemampuan distribusi ke titik bagi kelompok tani.

Diki Mardiansyah

Title	TRGU Siasati Kenaikan Harga Gandum	 Kementerian Pertanian
Date	5 Oktober 2023	
Media	Koran Kontan	
Page	11	
Author	Diki Masrdiansyah	

■ INDUSTRI TERIGU

TRGU Siasati Kenaikan Harga Gandum

JAKARTA. Emiten produsen tepung olahan gandum, PT Cerestar Indonesia Tbk (TRGU) memperbanyak pembelian pasokan gandum impor. Maklumlah, harga gandum sekarang sedang dalam tren menurun, bahkan menyentuh level terendah dalam satu bulan terakhir.

Upaya memperkuat pasokan gandum impor itu dilakukan guna mengantisipasi lonjakan harga gandum dunia. Sebab, jika ada kenaikan harga, maka di awal-awal kenaikan itu biasanya terjadi pembelian tepung terigu di pasar domestik dalam jumlah besar. Fenomena itu biasa terjadi guna mengantisipasi kenaikan harga gandum yang berkelanjutan.

Dengan stok yang memadai, maka TRGU bisa mengunci harga jual terigu di level sebelum terjadi kenaikan harga. "Jadi, itu siasat kami jika harga gandum suatu saat naik," ujar *Chief Financial Officer* TRGU, Mulyadi Chandra kepada KONTAN, Rabu (4/10).

TRGU telah melakukan pembelian jangka panjang untuk mengamankan bahan baku gandum hingga kuartal IV-2023. Mulyadi menuturkan,

pasar tepung terigu di Indonesia masih sangat besar dan terus bertumbuh. Namun, pasar terigu diklaim memiliki *barrier to entry* yang tidak mudah bagi pemain baru.

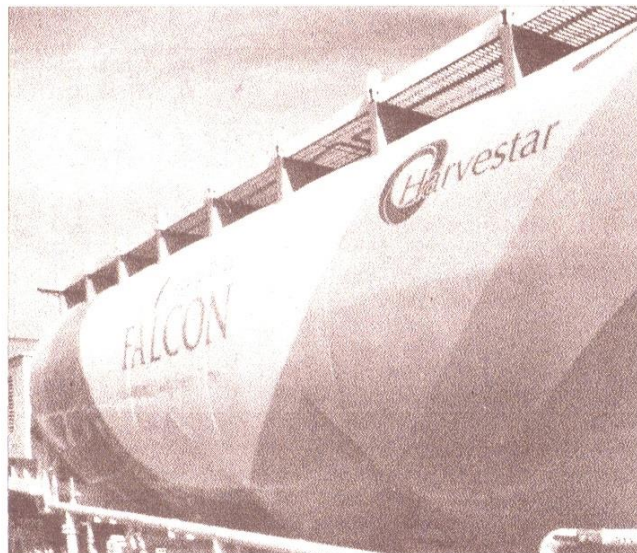
"Kami sendiri memiliki infrastruktur yang kuat dan siap (untuk memaksimalkan pasar)," ujar Mulyadi.

Untuk memaksimalkan pasar terigu di dalam negeri, TRGU cukup gencar melakukan penambahan kapasitas produksinya. Salah satunya dengan melakukan penambahan satu *line* produksi sebesar 600 metrik ton (MT) per hari di Gresik, Jawa Timur. Pabrik tersebut ditargetkan rampung tahun ini dan mulai beroperasi komersial pada kuartal I-2024.

"Dengan demikian, tahun depan (total) kapasitas produksi akan naik menjadi 2.200 MT/hari," ujar Mulyadi.

Namun, untuk mengurangi risiko fluktuasi harga gandum, belakangan perusahaan ini mulai melakukan pengembangan diversifikasi produk dengan merambah industri pakan ternak.

Sekadar informasi, pada semester 1-2023, TRGU membukukan pendapatan sebesar Rp



Dok. TRGU

Upaya memperkuat pasokan gandum impor itu dilakukan guna mengantisipasi lonjakan harga gandum dunia.


2,4 triliun, meningkat 53% *year on year* (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun demikian, laba kotor tercatat sebesar Rp 107,5 miliar atau turun 21% yoy karena beban pokok pendapatan yang meningkat lebih tinggi, yaitu mencapai 60% yoy menjadi Rp 2,3 triliun.

Adapun laba bersih yang

dapat diatribusikan ke entitas induk pada periode ini tercatat sebesar Rp 6,5 miliar, turun 67% yoy.

Penurunan ini terutama diakibatkan *working days* yang lebih pendek di kuartal II-2023, sehingga produktivitas menjadi kurang maksimal.

Diki Mardiansyah

Title	Harga Komoditas Susul Beras, Pemerintah Diminta Waspada	
Date	5 Oktober 2023	
Media	Media Indonesia	
Page	10	
Author	Fik/E-3	

Harga Komoditas Susul Beras, Pemerintah Diminta Waspada

IKATAN Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) meminta pemerintah untuk waspada melihat gejala tren kenaikan harga pangan pada pekan ini menyusul kenaikan harga beras yang lebih dahulu terjadi.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Ikappi Syahrul Reza Saputra mengatakan, selain beras, beberapa komoditas yang memiliki potensi naik ialah cabai. Menurut datanya, cabai merah keriting akan mengalami kenaikan sebesar Rp500; menjadi Rp46 ribu per kilogram (kg).

Kemudian, cabai rawit merah juga akan naik Rp1.000, menjadi Rp46.500 per kg, cabai merah besar atau tw menjadi Rp54 ribu per kg, dan bawang putih melonjak sebesar Rp9.000, menjadi Rp49 ribu per kg. Ia menyebutkan bahwa naiknya harga cabai dan bawang itu diakibatkan faktor cuaca ekstrem El Nino yang masih melanda di beberapa daerah hingga sekarang.

Selain itu, Syahrul menambahkan, harga daging ayam juga naik menjadi Rp40 ribu per kg. Begitu pun juga dengan telur, yang meningkat Rp200.

“Beberapa komoditas mengalami kenaikan, jadi kami meminta pemerintah untuk mengantisipasi beberapa hal yang berpotensi mendorong kenaikan pangan tersebut,” kata Syahrul dalam keterangan tertulisnya, kemarin.

Lebih lanjut, Syahrul me-


ngatakan Ikappi juga akan meminta pemerintah untuk serius melakukan upaya penguatan pangan melalui program pangan yang lebih aktif lebih masif.

“Sehingga di dalam kondisi dan situasi global yang terus sulit, kita dapat mempertahankan swasembada pangan menjadikan pangan sebagai salah satu kekuatan di negeri kita,” ujar Syahrul.

Terkait dengan beras, Direktur Utama Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Budi Waseso alias Buwas meminta kepada para penjual beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) di *e-commerce* tidak menggabungkan ongkos kirim (ongkir) dengan harga beras. “Jadi, harga berasnya tetap. Nilai transportasi atau ongkos kirim bisa sendiri, jangan dicampur harga beras,” kata Buwas di Pasar Rawamangun, Jakarta, kemarin.

Pernyataan tersebut ia sampaikan usai meninjau stok dan harga beras di Pasar Rawamangun bersama Menteri BUMN Erick Thohir. Buwas juga meminta agar harga beras SPHP tidak dicampur dengan biaya-biaya lainnya, seperti biaya administrasi *e-commerce*.

Penggabungan biaya-biaya tersebut dengan harga beras Bulog di *e-commerce* dapat mengakibatkan masyarakat berpikir bahwa beras SPHP di *e-commerce* lebih mahal. “Padahal, kalau belanja langsung ke pasar, biaya transportasinya lebih mahal,” kata Buwas. (Fik/E-3)

Title	Kawasan Pangan Nusantara di Sulteng untuk Penyangga IKN	
Date	5 Oktober 2023	
Media	Media Indonesia	
Page	8	
Author	MT/YK/N-1	

Kawasan Pangan Nusantara di Sulteng untuk Penyangga IKN

WAKIL Presiden KH Ma'ruf Amin meresmikan Kawasan Pangan Nusantara (KPN) di Sulawesi Tengah sebagai penyangga kebutuhan ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur di Desa Talaga, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, kemarin.

Menurut Wapres, KPN saat ini menjadi salah satu prioritas pemerintah untuk menghindari terjadinya krisis pangan seperti yang terjadi di dunia saat ini.

"Untuk itu, kita ingin mengantisipasi kemungkinan itu dengan menyiapkan salah satunya kawasan pangan nasional yang ada di Sulawesi Tengah ini," kata Wapres dalam sambutannya.

Pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur memberi dampak positif terhadap wilayah berdekatan. Salah satunya Provinsi Sulawesi Tengah yang disiapkan sebagai salah satu penopang kebutuhan pangan di ibu kota baru nantinya.

Dalam kesempatan itu Wapres Ma'ruf Amin meninjau KPN di atas tanah seluas 124 hektare. Turut mendampingi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura, dan rom-

bongan.


Total luas KPN yang akan dicapai di Sulawesi Tengah sebesar 15.000 hektare dengan potensi tanaman pangan berupa jagung, kedelai, padi persawahan, dan tanaman hortikultura serta penggemukan sapi.

Pada kesempatan itu Wapres Ma'ruf Amin menyerahkan bantuan 122 alat pertanian, 30 ton bibit jagung, dan pupuk organik secara simbolis kepada perwakilan petani dari lima kelompok tani.

Wapres juga menyerahkan 100 sertifikat tanah dari Badan Pertanahan Nasional secara simbolis kepada lima orang perwakilan masyarakat. Sebagai penanda diresmikannya KPN di Kabupaten Donggala, dilakukan penanaman pohon durian.

Pada bagian lain, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan Jatim telah melakukan upaya mitigasi pencegahan krisis pangan dengan mengoptimalkan sumur pompa dan saluran irigasi untuk petani.

"Untuk itu, kepada seluruh pimpinan daerah agar petani mendapatkan prioritas, utamanya terhadap layanan irigasi secara maksimal untuk menjaga jumlah produksi," kata Khofifah saat kunjungan kerja di Tuban, kemarin. (MT/YK/N-1)

Title	Pembelian Beras SPHP Dibatasi Cegah Dijual Lagi	 Kementerian Pertanian
Date	5 Oktober 2023	
Media	Media Indonesia	
Page	8	
Author	Widjajadi	

Pembelian Beras SPHP Dibatasi Cegah Dijual Lagi

Daerah terus menstabilkan harga beras yang belum stabil sampai saat ini. Bulog menjamin stok beras aman sampai akhir tahun.

WIDJAJADI

widjajadi@mediaindonesia.com

BULOG Surakarta memastikan stok cadangan beras pemerintah lewat program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) terus digelontorkan di pasar-pasar untuk menstabilkan harga agar masyarakat tidak panik. Bulog memastikan stok beras aman kendati ada aturan pembelian beras SPHP dibatasi hanya 10

kg di ritel modern.

“Baik pasar tradisional, toko kelontong, maupun ritel modern terus kita pasok. Namun, khusus pembelian di ritel modern harus diatur, khususnya beras SPHP, maksimal dua pack atau 10 kg saja,” kata Kepala Bulog Surakarta Andy Nugroho kepada *Media Indonesia*, kemarin.

Menurutnya, pembatasan itu merupakan kebijakan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebagai langkah efektif

untuk menekan harga. “Bukan sebaliknya beras SPHP di ritel diperjualkan kembali lewat pasar tradisional dengan ganti packing,” lanjutnya.

Perum Bulog Bangka juga membatasi penjualan beras SPHP di toko ritel. Alasannya untuk mencegah penimbunan beras atau dijual kembali.

Staf Bulog cabang Bangka Wahyu Syafariansyah membenarkan Bulog membatasi pembelian beras medium SPHP hanya 10 kg. “Kita mencegah, jangan sampai harga beras tinggi ini di manfaatkan bagi mereka yang cari keuntungan dengan memborong beras Bulog,” kata Wahyu.

Pembatasan pembelian beras SPHP sudah diberlakukan di

Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

Kepala Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian (Diskuperdagin) Kabupaten Cianjur, Komarudin, menjelaskan pada Festival Pameran Pertanian yang digelar bersamaan Hari Tani Nasional pekan lalu, kebijakan pembatasan pembelian beras SPHP sudah mulai diterapkan.

“Pada peringatan Hari Tani Nasional itu kan ada gelar pangan murah. Salah satunya disediakan beras SPHP dengan harga Rp10.900 per kg. Nah, pembeliannya saat event itu sudah mulai dibatasi. Jadi, satu orang itu maksimal hanya membeli 1 pack kapasitas 10 kg atau 2 pack kapasitas 5 kg,” kata Komarudin saat dihubungi *Media Indonesia*.

Pasar murah

Pada bagian lain, operasi pasar murah beras terus digulirkan di sejumlah daerah untuk menekan harga beras yang masih mahal.

Pemprov Jawa Tengah menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) guna menekan angka inflasi. Acara yang diselenggarakan Dinas Ketahanan Pangan Jawa Tengah berkolaborasi dengan Badan Pangan Nasional, BUMN, BUMD, dan gabungan kelompok tani itu dihelat di

Kecamatan Pasar Kliwon dan PT Sritex, kemarin.


Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatra Utara, juga menggelar pasar murah selama dua hari di Gedung Serbaguna Tarutung. Selain beras, pasar murah menyediakan minyak goreng dan gula pasir.

Stok beras di gudang Bulog Cirebon masih mencukupi hingga musim tanam rendeng mendatang. Bulog Cirebon pun kini akan menyalurkan bantuan pangan tahap kedua.

Demikian juga stok beras di Bengkulu, Klaten, Jawa Tengah, dan Tasikmalaya aman hingga akhir tahun. Bulog meminta masyarakat tidak panik karena kebutuhan beras mencukupi.

Pada bagian lain, permintaan pasar akan beras khususnya medium di kalangan usaha penggilingan padi di Kabupaten Badung, Bali, belakangan menurun bahkan lesu. Hal ini diduga dampak beredarnya beras SPHP.

Seperti diungkapkan Rai Sujaya, pemilik usaha penggilingan padi Purnama Sari di Desa Tumbakbayuh, Kecamatan Kuta Utara, Badung, Bali, saat ini hanya memproduksi beras 5 ton per hari dari sebelumnya sampai 15 ton. (RS/MY/JS/HT/AS/AD/BB/UL/JH/RF/RR/RN-1)

Title	AI Pamerkan Capaian Pemprov	 Kementerian Pertanian
Date	5 Oktober 2023	
Media	Satelit News	
Page	1 Part 1	
Author	Luthfi/Gatot	

AI Pamerkan Capaian Pemprov

Paripurna HUT Banten ke-23

SATELITNEWS, SERANG—Penjabat Gubernur Al Muktabar membeberkan sejumlah keberhasilan yang dicapai Pemerintah Provinsi Banten pada rapat paripurna HUT Banten ke-23, Rabu (4/10). Dia memamerkan penurunan tingkat pengangguran terbuka, peningkatan pertumbuhan ekonomi hingga berkurangnya angka kemiskinan.

Al Muktabar mengungkapkan Produk Domestik Regional


Bruto (PDRB) atau pengeluaran per kapita masyarakat di Provinsi Banten tumbuh dengan cepat. Pada tahun 2007 sebesar Rp13,03 juta naik menjadi Rp60,99 juta pada tahun 2022.

"Pertumbuhan ekonomi Banten tahun 2023 ditargetkan pada kisaran 5,02-5,15 persen. Namun pada triwulan II 2023 sudah mengalami pertumbuhan sebesar 4,83 persen (y-on-y). Artinya target itu kita optimis bisa capai bahkan bisa melampaui," kata Al Muktabar.



PARIPURNA: Penjabat Gubernur Banten bersama bupati dan wali kota yang menghadiri sidang paripurna HUR Banten ke-23 di DPRD, Rabu (4/10). ISTIMEWA

BACA HAL 8

Title	AI Pamerkan Capaian Pemprov	 Kementerian Pertanian
Date	5 Oktober 2023	
Media	Satelit News	
Page	1 Part 2	
Author	Luthfi/Gatot	

Mendagri Apresiasi Kinerja Pemprov

■AL PAMERKAN...

Sambungan dari hal 1

Begitu pula kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Banten dimana pada tahun 2022 mengalami perbaikan yang ditandai dengan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari 8,98 persen pada tahun 2021 menjadi 7,97 persen pada tahun 2023.

"Hal ini menunjukkan pemulihan aktivitas perekonomian yang berdampak pada penguatan penyerapan tenaga kerja," ujarnya.

Selanjutnya, tingkat kemiskinan di Provinsi Banten juga mengalami perbaikan dari tahun 2007 sebesar 9,07 persen menjadi 6,17 persen atau 826,13 ribu jiwa pada Maret 2023. Capaian tersebut masih lebih baik dari tingkat kemiskinan nasional sebesar 9,36 persen.

Kemudian gini ratio pada tahun 2007 sebesar 0,370 menjadi 0,368 pada tahun 2023. kondisi itu lebih baik dibandingkan kondisi ketimpangan nasional dengan tingkat gini ratio sebesar 0,388 poin. Demikian juga dengan pembangunan manusia di Banten yang secara konsisten terus mengalami kemajuan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Banten mengalami peningkatan yang luar biasa. Pada tahun 2007 sebesar 61,14 persen dan pada tahun 2022, IPM Banten telah mencapai 73,32 poin atau meningkat 0,60 poin dibandingkan tahun 2021 sebesar 72,72 poin.

"Capaian itu berada lebih tinggi bila dibandingkan dengan capaian IPM nasional yang sebesar 72,91 poin. Angka tersebut menempati peringkat delapan nasional," pungkasnya.

Berkenaan dengan kemarau panjang akibat dari El Nino, dijelaskan Al Muktabar, kondisi terkini Banten yang terdampak kekeringan per 22 september 2023 mencapai 4.722 hektar atau 1,02 persen dari total luas tanam dengan luasan 463.613 hektar. Dengan rincian kekeringan ringan 1.789 hektar, kekeringan sedang 1.532 hektar, kekeringan berat 887 hektar dan puso 514 hektar.

Atas kondisi itu, Pemprov Banten senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat, dengan melakukan berbagai langkah antisipasi seperti menyalurkan cadangan pangan pemerintah sebesar 214,99 ton beras yang bersumber dari dana insentif daerah sebesar 2.139,17 ton beras yang siap disalurkan apabila masyarakat

kat sudah membutuhkan.

Peningkatan ketersediaan air dengan membangun/memperbaiki embung, dam, parit, sumur pantek, power thresher, sumur resapan, dan pompa-nisasi serta pengelolaan jaringan irigasi sepanjang 361,3 kilometer dengan luas layanan 29,211 hektar serta dukungan pembiayaan KUR dan asuransi pertanian, dan persiapan lumpung pangan. "Provinsi Banten juga memiliki pangan lokal seperti jagung, pisang, porang, singkong, talas beneng, sukun dan ubi jalar," ujarnya.

Kepala Dinas Pertanian (Dis-tan) Provinsi Banten Agus M Tauchid menambahkan, saat ini, Provinsi Banten dalam hal kedaulatan pangan telah mampu mewujudkan 14 kemandirian pangan melalui pengembangan pertanian berkelanjutan, pengembangan potensi pangan lokal, diversifikasi pangan, penguatan kapasitas petani, peningkatan sarana prasarana pertanian, dan peran aktif masyarakat serta mitigasi risiko pangan melalui penyediaan cadangan pangan. "Hal itu salah satunya terlihat dari realisasi produksi padi bulan Januari sampai dengan Agustus 2023 sebanyak 1,65 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) atau setara dengan 1.04 juta ton beras," katanya.

Kemudian, lanjut Agus, prog-nosa produksi padi bulan September sampai dengan Desember sebanyak 756,4 ribu ton GKG atau setara dengan 478,2 ribu ton beras. Sehingga dapat diproyeksikan bahwa pada tahun 2023, produksi padi Provinsi Banten sebanyak 2,4 juta ton GKG atau setara dengan 1,5 juta ton beras. "Berdasarkan perhitungan kebutuhan beras pada tahun 2023 sebanyak 1,4 juta ton beras. Artinya Provinsi Banten telah mampu memenuhi kebutuhan beras secara 15 mandiri bahkan neraca produksi beras mengalami surplus sebanyak 128,3 ribu ton," ucapnya.

Sementara itu kinerja Pemerintah Provinsi Banten mendapatkan apresiasi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Staf Bidang Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga, Togap Simangunsong. Hal itu disampaikan Togap pada rapat paripurna istimewa dalam rangka HUT Provinsi Banten ke-23, Rabu (4/10).

Togap mengatakan, apresiasi itu diberikan karena berdasarkan data-data pencapaian Provinsi

Banten dari tahun ke tahun memang terus tumbuh ke arah yang lebih positif. Misalnya pertumbuhan ekonomi Banten pada triwulan I 2023 yang mengalami peningkatan dari 4,68 persen (YoY) dan pada triwulan 2 meningkat sebesar 4,83 persen.

"Keberhasilan pembangunan itu tentu tidak terlepas dari peran gubernur yang mempunyai kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kabupaten dan Kota," ujarnya.


Menurut Togap, peran gubernur sebagai wakil pemerintah di pusat di daerah harus semakin dimaksimalkan, utamanya dalam mengkoordinasikan program pembangunan daerah yang disnergikan dengan program pembangunan nasional, seperti pengendalian inflasi dan mendukung terlaksananya Pemilu 2024.

"Kemudian mengalokasikan 40 persen anggaran barang jasa untuk Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN), serta memaksimalkan pembinaan dan pengawasan lainnya. Selain juga harus mendengar aspirasi masyarakat yang tengah mengalami kondisi kesulitan," ucapnya.

Ia menyampaikan, pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh belanja pemerintahan daerah. Dimana, realisasi pendapatan provinsi Banten per 18 agustus 2023 sebesar 57,49 % dan realisasi belanja sebesar 51,67 %. "Namun realisasi pada periode yang sama pada tahun 2022 realisasi pendapatan 56,7 %, realisasi belanja sebesar 50,9% ini mendedikasikan kinerja keuangan dari sisi pendapatan dan belanja bertumbuh secara positif," ungkapnya.

Togap menyampaikan, dalam penyerahan wewenang pada daerah otonom yang secara tidak langsung memberikan hak pengawasan dan pembinaan kepada kabupaten/kota. Ia menyampaikan Provinsi Banten harus bisa memanfaatkan moment HUT ini untuk terus dimaksimalkan dan dikoordinasikan dalam berbagai program pembangunan daerah.

"Hendaknya Provinsi Banten dapat memanfaatkan moment ini untuk melakukan berbagai upaya pembangunan baik melalui optimisasi pendapatan yang dapat memicu pertumbuhan pembangunan tentunya melalui otonomi daerah yang dianut," ungkapnya. (luthfi/gatot)

Title	Beras Mahal di Lumbung Pangan	 Kementerian Pertanian
Date	5 Oktober 2023	
Media	Satelit News	
Page	9	
Author	Fadly Rahman	

OPINI

Beras Mahal di Lumbung Pangan

Fadly Rahman

HARGA beras masih tinggi. Penyebab naikannya dipertanyakan, mulai siklus panen, menurunnya produksi beras, El Nino, terhentinya impor beras dari India, hingga proyek food estate yang oleh beberapa pengamat ditengarai gagal mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Aspek kebijakan tata kelola pangan menjadi salah satu hal yang kerap dipersalahkan dalam perjalanan sejarah pangan di negeri ini. Proyek food estate yang saat ini dinilai berdampak buruk terhadap lingkungan, kehidupan masyarakat adat, dan kerawanan pangan dalamacamata historis sejatinya memiliki kausalitas dengan rangkaian kegagalan tata kelola pangan yang terjadi pada masa lalu.

Pada masa kolonial, para sarjana Eropa telah menyigi faktor alam yang mengakibatkan beras tidak dapat dipisahkan dari konsumsi masyarakat jajahan. Seorang ahli vulkanologi, Alexander L. ter Braake, dalam publikasi penelitiannya, *Volcanology in the Netherlands Indies* (1945), menyatakan surplus beras di Jawa tidak dapat dipisahkan dari aktivitas vulkanis yang merupakan takdir Kepulauan Nusantara sebagai bagian dari rangkaian cincin api dunia.

Aktivitas vulkanis berpengaruh besar dalam menyuburkan tanah pertanian. Tidak heran, selama berabad-abad hamparan hijau padi nan elok melekat dalam budaya masyarakat sejak masa kuno seperti terukir di relief kaki (Karmawibhanga) Candi Borobudur serta relief sawah pada batu candi di Trowulan yang menunjukkan suasana pedesaan di Majapahit.

Ketersediaan beras serta harganya yang terjangkau oleh rakyat tidak hanya menjadi indikator kesejahteraan rakyat, tetapi juga keberhasilan politik pangan para penguasa Kerajaan Mataram sebagaimana yang tersirat dalam bagian Babad Tanah Jawi.

Masalah Beras

Pada masa paro kedua abad ke-19, sistem tanam paksa kolonial mengubah secara paksa sawah-sawah menjadi lahan tanaman komoditas seperti tebu dan tembakau. Di samping kelaparan, malnutrisi, dan kematian massal yang diderita rakyat karena terbatasnya produksi beras akibat kon-



versi lahan, pemerintah kolonial terpaksa mengimpornya dari Birma (Myanmar) dan Muang Thai (Thailand) untuk memenuhi kebutuhan beras.

Ketika masa setelah kemerdekaan, Sukarno dalam buku Cindy Adams, *Bung Karno: Penjambung Lidah Rakjat Indonesia* (1966), menyinggung ketergantungan Indonesia terhadap beras impor yang menurutnya merupakan pengaruh jangka panjang dari kolonialisme Belanda. Ujarnya: "sampai di hari kita berdiri sendiri bebas dari pengisapan imperialisme kita bergantung pada beras impor".

Sikap Sukarno yang menyalahkan Belanda menyiratkan sejenis mental pascakolonial yang belum bisa "move on" dari stigma kolonialisme. Sebagai sebuah bangsa merdeka, tentu permasalahan pangan yang dihadapi Indonesia adalah bagaimana strategi dan kebijakan pemerintah dalam mengatasinya.

Sebuah artikel bertajuk Masalah Beras di majalah *Star Weekly* edisi 1955 yang ditulis seorang anonim mengungkapkan masalah tingginya permintaan beras di pasar dalam negeri. Si penulis menuturkan, permasalahan pangan dihadapi Indonesia pada masa awal 1950-an yang disebabkan kecacauan perimbangan antara permintaan dan penawaran beras di pasaran dunia. Pada masa itu, produksi beras dalam negeri sangat rendah, sedangkan harga beras internasional luar biasa tinggi.

Sukarno pada masa kekuasaannya pernah mengadakan program diversifikasi pangan agar sehari-hari rakyat tidak bergantung pada konsumsi beras. Ini dilakukan karena produksi beras dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan nasional. Namun, yang dia diidealkan tidak berjalan sesuai dengan harapan.

Pada dasarnya, perekonomian Indonesia adalah perekonomian beras. Pada masa Sukarno, beras berfungsi sebagai pengganti uang (barter). Dan, pada masa awal kekuasaan Soeharto –sebelum swasembada beras 1984– beras dijadikan bagian dari kompensasi pegawai negeri.

Hantu Malthus?

Jika berkaca dari sejarah panjang perberasan Indonesia, setidaknya ada dua aspek yang menghasilkan kerawanan beras di negara ini.

Pertama, kondisi ekosistem pangan kita yang telah banyak beralih fungsi.

Dalam hitungan Kementerian Pertanian, setiap tahun sekitar 100 ribu hektare lahan sawah tempat beras dihasilkan telah banyak beralih fungsi menjadi jalan, kawasan industri, dan perumahan.

Kedua, arah strategi pangan yang tidak pro lingkungan.

Dulu Sukarno pernah mengutuk kolonialisme Belanda yang mengubah lahan-lahan pertanian dan hutan menjadi lahan-lahan tanaman komoditas perkebunan. Kini permasalahan yang dihadapi ketika pemerintah menyadari lahan-lahan pertanian tidak lagi mencukupi kebutuhan beras nasional untuk menyuapi jutaan rakyat adalah membuka hutan demi membangun proyek lumbung pangan nasional.


Indonesia tengah dihantui pemikiran suram Thomas Robert Malthus dalam *An Essay on the Principle of Population* (1798) bahwa reproduksi manusia selalu berkembang lebih cepat daripada produktivitas hasil pertanian. Dus, jika selama ini bonus demografi dinilai sebagai modal masa depan Indonesia, ketika dihadapkan pada masalah krisis pangan seperti mahalnya harga beras sekarang ini, yang perlu diantisipasi adalah "petaka demografi" akibat menurunnya kesejahteraan hidup masyarakat.

Krisis beras di negeri lumbung pangan yang dikaruniai tanah air subur dan makmur ini tentu sebuah ironi. Ironi karena ketika yang subur dan makmur tidak dikelola dari, oleh, dan untuk rakyat, bukan kesejahteraan yang diperoleh, melainkan petaka yang menyengsarakan rakyat. (jpg/*)

Pengajar di Departemen Sejarah dan Filologi Universitas Padjadjaran.

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMANTAN**

Title	BSIP Kenalkan Layanan Baru	 Kementerian Pertanian
Date	5 Oktober 2023	
Media	Radar Bogor	
Page	10	
Author	Fat/c	

BSIP Kenalkan Layanan Baru

BOGOR—Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian (BSIP) menggelar Public Hearing Stansar Pelayanan Public di Aula Lantai 2 BSIP, Rabu (27/9). Acara berlangsung secara hybrid dan diikuti lebih dari 80 peserta.

Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Pertanian, Zulkifli menjelaskan, public hearing merupakan upaya pihaknya mendekati diri dengan masyarakat, sekaligus mendapat masukan dari berbagai pemangku kepentingan agar standar pelayanan BSIP Pascapanen sesuai harapan pengguna layanan.

"Badan Litbang Pertanian bertransformasi menjadi BSIP pada 21 September 2022 berdasarkan Perpres Nomor 117

Tahun 2022 sebagai institusi baru yang bertugas dalam menerapkan standardisasi dan meningkatkan daya saing. Hal ini juga berimplikasi adanya perubahan tugas dan fungsi unit kerja dan UPT dibawahnya termasuk BSIP Pascapanen," ujarnya.

Oleh karena itu, diperlukan Public Hearing terkait hal tersebut. Kegiatan ini juga disebutkan dapat menjadi ajang promosi dan edukasi terkait layanan yang dimiliki agar masyarakat luas dapat memanfaatkannya.

Plt Kepala BSIP Pascapanen menjelaskan, public hearing layanan standar instrumen pascapanen pertanian ini bersifat timbal balik. "Kami mensosialisasikan 13 layanan yang kami sediakan. Di sisi

lain, kami juga meminta masukan dari publik terkait mekanisme dan prosedur layanan tersebut," imbuhnya.


Dirinya berharap, layanan layanan yang tersedia di BSIP Pascapanen dapat mendukung terwujudnya cita-cita Kementerian Pertanian yakni mewujudkan pertanian yang maju, mandiri dan modern serta berdampak baik terhadap petani, pelaku usaha di bidang pertanian dan stakeholder lainnya.

Untuk mendukung tugas dan fungsi baru, BSIP Pascapanen menyediakan 13 layanan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, diantaranya Layanan Penyusunan RSNI, Layanan Pengujian Analisa Laboratorium, Layanan Laboratorium Kalibrasi, Layanan Penye-

lenggara Uji Profisiensi (PUP) Beras dan Gula putih.

Selain itu, terdapat pula Layanan Petugas Pengambil Contoh (PPC), Layanan Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa (LSPPro), Layanan Pendampingan Sertifikasi Halal (LPH), Layanan Inkubator Bisnis, Layanan Maklon (pemanfaatan alat pascapanen), Layanan Bimbingan Teknis, Layanan Magang dan Praktik Kerja Lapangan (PKL), Layanan Informasi dan Konsultasi/Studi Banding/Kunjungan dan Layanan Perpustakaan Khusus Standard Pascapanen.

Public hearing ini juga diisi dengan kegiatan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan pelaksanaan Public Hearing Standar Pelayanan Publik BSIP Pascapanen. **(fat/c)**

Title	Gagal Panen Akibat Kemarau	 Kementerian Pertanian
Date	5 Oktober 2023	
Media	Satelit News	
Page	11	
Author	Mg4/mardiana	

Gagal Panen Akibat Kemarau

Petani Bisa Mendapatkan Ganti Rugi

SATELITNEWS.COM, PANDEGLANG - Petani Pandeglang yang mengalami gagal panen akibat kemarau, bakal mendapatkan ganti rugi melalui Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) sebesar Rp6 juta per hektare. Bantuan itu diberikan, hanya kepada petani yang mengasuransikan tanaman padinya.

Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Uun Junandar mengatakan, pihaknya sedang menerjunkan tim untuk melakukan pemeriksaan terhadap tanaman padi milik petani yang terkena dampak kekeringan.

"Kita periksa dan kita pantau. Kalau memang benar gagal panen, bakal kita berikan ganti rugi melalui asuransi," kata Uun, Rabu (4/10).

Uun memastikan, bantuan ganti rugi tersebut hanya diberikan kepada para petani yang mengikuti AUTP, sedangkan yang tidak masuk dalam program itu, tidak akan mendapatkan ganti rugi.

"Iya hanya untuk yang mengikuti asuransi itu, kalau tidak ya enggak bisa. Karena kan program itu memang untuk melind-

ungi petani," tambahnya.

Uun menerangkan, setiap anggota yang masuk dalam program AUTP diwajibkan membayar iuran sebesar Rp180 ribu per hektare. Akan tetapi, Pemerintah Daerah mensubsidi bantuan itu, sehingga para petani hanya membayar sebesar Rp36 ribu per hektare.

"Petani yang masuk asuransi ini, nantinya akan mendapatkan ganti rugi Rp6 juta per hektare," ujarnya.

Uun mengatakan, secara keseluruhan lahan pertanian di Pandeglang lebih dari 56 ribu hektare, namun yang tercatat sebagai anggota AUTP baru dua ribu hektare. Padahal, kata dia, tahun 2022 kemarin, Pandeglang ditargetkan 20 ribu hektare lahan oleh Pemerintah Pusat.

"Belum sampai satu persen yang mengikuti program AUTP, padahal kalau terjadi bencana, para petani bisa mendapatkan ganti rugi atas lahan yang terkena dampak bencana. Kalau tidak ikut dalam program itu, para petani tidak bisa mendapatkan ganti rugi sam sekali," ujarnya lagi.

Hingga saat ini tambah Uun, ada sebanyak 1.300 hektare lebih sawah petani yang mengalami kekeringan akibat kemarau. Saat ini pihaknya sedang melakukan pendataan sawah yang terancam puso.

"Kita masih melakukan pendataan berapa luasan sawah yang kemungkinan puso," tuturnya.


Dikonfirmasi terpisah, Ketua Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Pandeglang, Anton Haerul Samsi mengajak kepada semua petani di Kabupaten Pandeglang agar bisa mengikuti program AUTP tersebut.

Tujuannya, agar tanaman padi yang gagal panen akibat kemarau, serangan hama, banjir, dan lainnya bisa mendapatkan ganti rugi.

"Semua petani harus bisa mengikuti program itu, meskipun ada iuran atau bayaran, tetapi kan sudah disubsidi oleh pemerintah. Dengan program itu, tentunya kerugian petani tidak terlalu besar saat gagal panen," pungkasnya.

Anton juga meminta kepada pihak dinas, agar terus melakukan asuransi mengenai program tersebut kepada para petani. Karena pada saat terjadi gagal panen, para petani akan sangat dirugikan.

"Harus terus dioptimalkan sosialisasi dan pemberian pemahaman program AUTP. Karena tidak menutup kemungkinan banyak petani yang kurang mengetahui program itu," imbihnya. **(mg4/mardiana)**

Title	Gagal Panen Bisa Dapat Ganti Rugi	 Kementerian Pertanian
Date	5 Oktober 2023	
Media	Bandung Ekspres	
Page	1 Part 1	
Author	San/fir/yan	

Gagal Panen Bisa Dapat Ganti Rugi

BANDUNG - Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Pemdaprov Jabar) melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (DTPH) menawarkan kepada para petani untuk mendapatkan ganti rugi atas lahan sawah atau pertanian yang mengalami gagal panen akibat kekeringan.

Kepala Dinas DTPH Jabar Dadan Hidayat mengatakan Ganti rugi tersebut akan diberikan kepada petani berupa klaim asuransi apabila para petani mengalami gagal panen.

"Ganti rugi akan diberikan kepada para petani yang mengalami gagal panen akibat kekeringan, terkena banjir, serangan hama, hingga penyakit," ujar Dadan dalam ketatangannya kepada wartawan, Rabu, (8/9).

Ganti rugi nantinya akan diberikan dari lahan yang diasuransikan melalui usaha tani padi yang telah dialokasikan oleh Pemprov Jabar.

Menurut Dadan, pada 2023 ini dapat alokasi Hampir 75 ribu hektar agar teman-teman (petani) bisa ikut asuransi untuk mengantisipasi tentang gagal panen akibat kekelembaban, banjir, serangan hama dan penyakit.


"Jadi memang petani itu bisa diasuransikan usaha tani padi kan," ungkapnya.

Untuk mengikuti program ini, asuransi usaha tani padi, Dadan mengatakan para petani diharuskan membayar sebesar Rp36.000 untuk satu kali musim tanam atau per hektar dalam mengikuti program tersebut.

► *Baca Gagal... Hal 2*



SUDAH MENGKHAWATIRKAN: Kondisi tanah yang sudah mengalami retak karena kondisi cuaca yang sangat menyengat panas terjadi di Kota Bandung pada siang hari.

Title	Gagal Panen Bisa Dapat Ganti Rugi	 Kementerian Pertanian
Date	5 Oktober 2023	
Media	Bandung Ekspres	
Page	1 Part 2	
Author	San/fir/yan	

Berikan Bantuan Air Bersih

■ GAGAL

Sambungan dari hal 1

“Dia (petani) hanya bayar Rp36.000 dan nanti kalau gagal panen akibat kekeringan atau lain sebagainya itu akan mendapatkan ganti rugi Rp6 juta. Jadi sebetulnyamah (para petani), harus bayar Rp180 ribu, tapi oleh pemerintah disubsidi yang 80 persennya dan sisanya 20 persen itu dibayar oleh petani,” ucapnya. Sehingga dengan langkah tersebut, Dadan berharap dapat membantu para petani khususnya yang terancam kekeringan, banjir, serangan hama, hingga wabah penyakit.

“Dan jabar tahun depan juga (2024), itu sudah merencanakan akan membantu petani dengan membayarkan lahan-lahan yang diprediksi akan bermasalah seperti kering, banjir, hama dan lain sebagainya,” kata dia.

Sebelumnya, Dadan mencatat ada sekitar 12 ribu hektar lahan pertanian yang sudah dilanda kekeringan

selama periode April - Agustus 2023 akibat dampak dari suhu panas atau El Nino yang saat ini tengah terjadi.

“Jadi luas kekeringan di Jabar dari bulan April - Agustus 2023 itu sekitar 12.825 hektar (lahan pertanian), potensi atau terancam di 21.423 hektar. Nah yang sudah kita pulihkan, itu di 3.655 hektar,” ucapnya di Bandung Jum’at (8/9) lalu.

Sementara itu, Krisis air bersih di Kota Cimahi menjadi polemik di tengah kemarau panjang saat ini. Dampaknya banyak masyarakat yang kesulitan untuk mendapat air bersih dan layak minum.

Untuk penerimaan air bersih, pihak BPBD akan menerima laporan dari setiap kelurahan yang terdampak krisis air bersih. Namun, masih ada beberapa kelurahan yang belum lapor.

“Jadi untuk wilayah yang mengalami kesulitan mendapat air bersih, itu ada jatah dari pabrik yang memberikan air bersih di buka selama dua jam dari jam 3 sampai 5

sore,” ucap Fithriandy Kurniawan Kepala Pelaksana BPDB Kota Cimahi saat ditemui Jabar Ekspres pada Rabu, (04/10).

Beberapa waktu lalu, BPBD Kota Cimahi melakukan pembagian air bersih di Kp. Kamarung Permana Barat, Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara. Sebanyak 300 jiwa di RT. 04 RW.04 dan 320 jiwa di RT. 05 RW. 04.

Jumlah air bersih sebanyak 5.500 liter dibagikan pada masyarakat, guna memberikan bantuan untuk mendapatkan air yang layak minum dan masak.

Fithriandy mengatakan untuk pembagian air bersih harus lewat lurah masing-masing. Nantinya data jumlah penduduk di masing-masing wilayah dikirimkan pada BPBD untuk mengirimkan bantuan air bersih.

“Harus melalui lurah, bahwa tempat itu memang kekurangan air. Jadi beberapa titik yang krisis air bersih, berapa jumlah jiwa dan kepala kelu-

arganya (KK),” ucapnya

Menurut data yang dijelaskan oleh Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Cimahi, Rohmat menerangkan masih ada tiga kelurahan yang masih belum melaporkan perihal kekurangan air bersih.

“Ada tiga kelurahan, diantaranya Kelurahan Baros, Kelurahan Cigugur Tengah, dan Kelurahan Cibeureum belum lapor perihal kekeringan, sampai saat ini ada 12 kelurahan yang terdampak,” terangnya.

BPBD Kota Cimahi memberikan bantuan air bersih pada setiap harinya. Perihal masih ada beberapa wilayah yang belum mendapatkan bantuan dikarenakan masih belum adanya laporan dari kelurahan masing-masing.

“Kemungkinan belum ada laporan karena belum ada keresahan dari masyarakatnya. Mungkin ada beberapa hal yang membuat belum laporan, contohnya seperti pabrik memberikan bantuan air bersih,” tambahnya Fithriandy. (san/fir/yan)

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMANTAN**

Title	Ganjar Dorong Petani Beralih ke Pupuk Organik
Date	5 Oktober 2023
Media	Radar Bogor
Page	8
Author	Wir



Kementerian Pertanian

Ganjar Dorong Petani Beralih ke Pupuk Organik

IMBAUAN Ganjar Pranowo agar petani beralih ke pupuk organik disambut antusias para petani. Contohnya, petani bawang merah di Brebes yang beralih menggunakan pupuk organik, justru semakin untung. Selain tanahnya subur, produktivitasnya pun meningkat 30 persen.

Penyuluh Pertanian di Kecamatan Brebes Hery Priyono mengatakan, sebelumnya lahan pertanian di Brebes banyak rusak karena penggunaan pupuk dan pestisida kimia yang berlebihan.

Karena itu, ajakan Ganjar agar menggunakan pupuk organik ditindaklanjuti petani dengan mengikutsertakan delapan kelompok tani dari delapan desa. "Kedatangan Pak Ganjar Pranowo tahun lalu dalam rangka pemulihan penyehatan lahan kami tindaklanjuti. Kami lalu belajar bio remediasi atau penyehatan lahan garapan," tuturnya, Rabu (21/6).

Hasilnya, dalam kurun waktu setahun belakangan, petani mulai merasakan perubahan pada kondisi tanah. Kini setelah mendapatkan perlakuan semi organik dengan pupuk dan pestisida alami, serta mengurangi penggunaan produk kimia, tanah garapan lebih sehat.



Kalau saya dulu pakai kimia full itu per musim tanam butuh sekitar Rp10 juta. Nah kalau (dipadukan) pakai pupuk organik sekitar Rp7 jutaan. Kini bawang yang dihasilkan pun cenderung super lebih besar. Panennya dulu 1,5 ton, sekarang bisa 1,8 ton sampai 2 ton,"

Wiyono

Ketua Gapoktan Unggul Makmur
Desa Krasak

Selama setahun ini, mereka menyadari bahwa dari dua sampai tiga kali panen, produksi juga meningkat. Panen di Desa Wangen Dalem bisa menghasilkan 13,6 ton bawang merah. Sementara yang biasa (pakai kimia) hanya berkisar 9-11 ton," bebarnya.

Ketua Gapoktan Unggul Makmur, Desa Krasak, Wiyono mengakui hal itu. Namun dia mengakui penggunaan

pupuk organik memang belum 100 persen.


Pupuk organik masih dikombinasikan dengan pupuk kimia. Terutama jika serangan hama menggila. "Kalau saya dulu pakai kimia full itu per musim tanam butuh sekitar Rp10 juta. Nah kalau (dipadukan) pakai pupuk organik sekitar Rp7 jutaan. Kini bawang yang dihasilkan pun cenderung super lebih besar. Panennya dulu 1,5 ton, sekarang bisa 1,8 ton sampai 2 ton," terangnya.

Ganjar Pranowo memang menyarankan petani bawang di Brebes beralih ke pupuk organik guna mengembalikan kesuburan tanah. "Pupuk itu subsidiya kurang, makanya kita ajak mereka untuk pindah ke organik dan petani setuju. Cuma memang harus pelan-pelan. Jadi kalau sudah masuk masa tanam, masa pemupukan kita turunkan tim," kata Ganjar saat itu.

Atas keberhasilannya itu, Kementerian Pertanian RI menilai Ganjar Pranowo berhasil menjalankan program peningkatan kesejahteraan petani di Jawa Tengah. Untuk itu, Ganjar diusulkan menerima dua tanda kehormatan, yakni gelar tanda kehormatan (GTK) Satyalencana Pembangunan dan Wira Karya. (**wir**)

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMANTAN**

Title	Ganjar Dorong Petani Pakai Pupuk Organik	 Kementerian Pertanian
Date	5 Oktober 2023	
Media	Radar Bandung	
Page	5 Part 1	
Author	Radar Bandung	

Ganjar Dorong Petani Pakai Pupuk Organik

UPAYA meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota kelompok usaha jamur dalam pengolahan limbah baglog jamur tiram menjadi pupuk organik dan grow block, Institut Teknologi Bandung (ITB) melalui program pengabdian kepada masyarakat menggelar pelatihan dan pendampingan terapan teknologi pengolahan limbah Baglog Jamur Tiram di Kabupaten Sumedang, beberapa waktu lalu.

Ketua tim, Dr. Ir. Eri Mustari, M.P. mengatakan, bahwa sasaran kegiatan tersebut yakni kelompok usaha jamur

tiram putih di kelompok usaha jamur Rancage, Dusun Cipari, Desa Sarimekar, Kecamatan Jatununggal dan Kecamatan Wado.

Sementara itu di lain kesempatan, imbauan Ganjar Pranowo agar petani beralih ke pupuk organik disambut antusias para petani. Contohnya, petani bawang merah di Brebes yang beralih menggunakan pupuk organik, justru semakin untung. Selain tanahnya subur, produktivitasnya pun meningkat 30 persen.

Penyuluh Pertanian di Kecamatan Brebes Hery Priyono mengatakan, sebelumnya la-

han pertanian di Brebes banyak rusak karena penggunaan pupuk dan pestisida kimia yang berlebihan. Karena itu, ajakan Ganjar agar menggunakan pupuk organik ditindaklanjuti petani dengan mengikutsertakan delapan kelompok tani dari delapan desa.

"Kedatangan Pak Ganjar Pranowo tahun lalu dalam rangka pemulihan penyehatan lahan kami tindakan juti. Kami lalu belajar bio remediasi atau penyehatan lahan garapan," tuturnya, Rabu (21/6).

Hasilnya, dalam kurun wak-


tu setahun belakangan, petani mulai merasakan perubahan pada kondisi tanah. Kini setelah mendapatkan perlakuan semi organik dengan pupuk dan pestisida alami, serta mengurangi penggunaan produk kimia, tanah garapan lebih sehat.

"Selama setahun ini, mereka menyadari bahwa dari dua sampai tiga kali panen, Produksi juga meningkat. Panen di Desa Wangen Dalem bisa menghasilkan 13,6 ton bawang merah. Sementara yang biasa (pakai kimia) hanya berkisar 9-11 ton," bebarnya.

■ **GANJAR** ...Baca Hal 9



MAKIN UNTUNG: Petani bawang merah di Brebes merasakan tanahnya subur dan produktivitasnya meningkat 30 persen setelah menggunakan pupuk organik

Title	Ganjar Dorong Petani Pakai Pupuk Organik	 Kementerian Pertanian
Date	5 Oktober 2023	
Media	Radar Bandung	
Page	5 Part 2	
Author	Radar Bandung	

Ganjar Dorong Petani Pakai Pupuk Organik

■ *Sambungan dari Hal 5*

Ketua Gapoktan Unggul Makmur, Desa Krasak, Wiyono mengakui hal itu. Namun dia mengakui penggunaan pupuk organik memang belum 100 persen. Pupuk organik masih dikombinasikan dengan pupuk kimia. Terutama jika serangan hama menggila.

“Kalau saya dulu pakai kimia *full* itu per musim tanam butuh sekitar Rp 10 juta. Nah kalau (dipadukan) pakai pupuk or-


ganik sekitar Rp 7 jutaan. Kini bawang yang dihasilkan pun cenderung super lebih besar. Panennya dulu 1,5 ton, sekarang bisa 1,8 ton sampai 2 ton,” terangnya.

Ganjar Pranowo memang menyarankan petani bawang di Brebes beralih ke pupuk organik guna mengembalikan kesuburan tanah.

“Pupuk itu subsidinya kurang, makanya kita ajak mereka untuk pindah ke organik dan petani setuju. Cuma memang harus pelan-pelan. Jadi kalau

sudah masuk masa tanam, masa pemupukan kita turunkan tim,” kata Ganjar saat itu.

Atas keberhasilannya itu, Kementerian Pertanian RI menilai Ganjar Pranowo berhasil menjalankan program peningkatan kesejahteraan petani di Jawa Tengah. Untuk itu, Ganjar diusulkan menerima dua tanda kehormatan, yakni gelar tanda kehormatan (GTK) Satyalencana Pembangunan dan Wira Karya. (***)

Title	PENINGKATAN PRODUKSI KOMODITAS PERTANIAN MELALUI PELAYANAN MEKANISASI PERTANIAN DI KABUPATEN BOGOR	 Kementerian Pertanian
Date	5 Oktober 2023	
Media	Radar Bogor	
Page	11	
Author	Radar Bogor	

DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BOGOR

PENINGKATAN PRODUKSI KOMODITAS PERTANIAN MELALUI PELAYANAN MEKANISASI PERTANIAN DI KABUPATEN BOGOR



TATANG MULYADI, SP, M.Si
Pit. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor

Upaya peningkatan produksi pertanian memerlukan dukungan dari aspek sarana dan prasarana produksi yang efektif, diantaranya adalah dukungan alat mesin pertanian. Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka mendukung pemenuhan produksi pertanian yang terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk, menurunya daya dukung lahan, rendahnya intensitas pertanaman, dan kepemilikan alsintan secara individu yang kurang menguntungkan. Penggunaan alat dan mesin pertanian tersebut harus dikelola dengan baik sehingga keberlanjutannya untuk petani dapat berjalan secara optimal. Diharapkan tidak akan terjadi lagi giliran penggunaan traktor atau panen yang memakan waktu lama karena tidak kebagian power thresher. Oleh karena itu, alat-alat dan mesin tersebut harus terpelihara dengan baik sehingga mempunyai umur pakai yang panjang.

Sampai saat ini, Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (Distanhorbun) terus berupaya memfasilitasi bantuan alsintan kepada para petani, namun terkadang pemanfaatan dan pengeloalannya masih belum optimal, salah satunya dikarenakan petani belum menerapkan pola pemeliharaan dan perawatan alsintan secara berkala, sehingga terdapat alsintan yang tidak terawat dan rusak di lapangan. Mempertimbangkan hal tersebut, Distanhorbun Kabupaten Bogor membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pertanian berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 32 Tahun 2022 yang menangani teknis operasional di bidang mekanisasi pertanian, yaitu penerapan teknologi mekanisasi pertanian serta fasilitasi perbengkelan mekanisasi pertanian.

Adapun UPT Pertanian yang menangani mekanisasi pertanian ini terdiri dari 3 (tiga) wilayah yaitu UPT Pertanian Wilayah III Cigudeg dengan wilayah kerja sebanyak 13 Kecamatan, UPT Pertanian Wilayah VI Dramaga dengan wilayah kerja sebanyak 14 Kecamatan, dan UPT Pertanian Wilayah X Jonggol dengan wilayah kerja sebanyak 13 Kecamatan. UPT Pertanian ini telah melakukan jasa pelayanan kepada kelompok tani/Gapoktan/UPJA sebagai berikut:

- 1. Pembentukan Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA)**
Unit Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian yang selanjutnya disebut UPJA merupakan suatu lembaga ekonomi pedesaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa dalam rangka optimalisasi penggunaan alat dan mesin pertanian untuk mendapatkan keuntungan usaha baik di dalam maupun di luar kelompok tani/Gapoktan. UPJA dibentuk sebagai bagian dari unit pelayanan kelompok tani/Gapoktan yang sudah terbentuk melalui Simluhtan, namun demikian pembentukan UPJA ini diprioritaskan pada Poktan/Gapoktan yang memiliki minimal 3 unit alat dan mesin pertanian dan berlokasi di sentra pertanian. Pembentukan UPJA ini sangat penting guna mendafta alat dan mesin pertanian yang didistribusikan pada kelompok tani setiap tahun. Pada tahun ini sudah terbentuk 45 UPJA sesuai SK Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor Nomor: 500.6.8/14351-luh Tanggal 25 Juli 2023.

Pada awal tahun pembentukan, UPT Pertanian memberikan pengetahuan dasar mengenai UPJA dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian Pertanian RI, UPTD Mektan Provinsi Jawa Barat, serta UPJA Tbas Cianjur yang sudah berhasil menjadikan UPJA menjadi profesional. Kelembagaan UPJA juga diarahkan untuk dapat membuat AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) yang dapat dijadikan pedoman dalam pengelolaan UPJA masing-masing.



Gambar 1.
Pertemuan UPJA Pembahasan AD/ART

- 2. Pemeliharaan Alsintan**
Pemeliharaan traktor adalah tindakan merawat mesin atau peralatan pabrik dengan memperbaharui umur masa pakai dan kerusakan mesin. Perawatan berkala didasarkan pada jam kerja mesin (HM), biasanya mengikuti rekomendasi dari pihak pembuat mesin, secara umum dapat diuraikan sebagai berikut : Perawatan berkala 50 jam, Perawatan berkala 100 jam, Perawatan berkala 200 jam, Perawatan berkala 300 jam, hingga Perawatan berkala 2 tahun.

Pemeliharaan dan perawatan ini sangat penting dilakukan oleh semua operator alsintan agar umur ekonomis alsintan berlangsung lama. Kondisi saat ini, masih banyak operator yang belum memahami dan menerapkan pola perawatan dan pemeliharaan yang sesuai dengan ketentuan, sehingga banyak alsintan yang cepat rusak. Untuk itu, UPT Pertanian melaksanakan bimbingan teknis terkait pemeliharaan atau perawatan alsintan yang bekerjasama dengan Polbangan Bogor.



Gambar 2.
Bimbingan Teknis Pemeliharaan Alsintan

- 3. Perbaikan Kerusakan Alsintan**
Pelayanan service kerusakan ini dilakukan setelah mendapat laporan dari kelompok tani adanya alsintan yang rusak, setelah itu dilakukan pengecekan ke lokasi, hasil pengecekan dicatat dalam laporan kerusakan, bila kerusakan alsintan ringan maka alsintan langsung diperbaiki di lokasi oleh petugas teknis UPT, namun bila hasil kerusakan berat maka UPT membuat surat rekomendasi untuk dilakukan perbaikan alsintan di bengkel resmi. Saat ini, UPT Pertanian telah menyediakan suku cadang untuk memfasilitasi perbaikan alsintan kurang lebih sekitar 10 unit alsintan dengan penyediaan yang masih terbatas. Namun demikian, pelayanan perbaikan ini telah dirasakan sebagian besar petani melalui UPJA di masing-masing daerah.

Untuk mempermudah pelayanan dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan para petani maupun operator UPJA, maka UPT menyiapkan para teknis UPJA yang dapat memperbaiki alsintan dengan kondisi rusak ringan melalui pelatihan perbengkelan alsintan yang bekerja sama dengan Polbangan Bogor, BB Mektan Citea Cianjur dan ahli teknis lainnya yang berasal dari penyedia alat dan mesin perbengkelan.



Gambar 3.
Kegiatan Perbaikan Alsintan di Poktan/Gapoktan/UPJA

- 4. Pengelolaan Brigade Alsintan**
Brigade alsintan bertujuan memberikan layanan kepada petani yang membutuhkan alsintan untuk proses budidaya dan pasca panen. Untuk mengoptimalkan pelayanan, setiap brigade alsintan harus memiliki minimal 3 (tiga) jenis alsintan yaitu traktor, rice transplanter, dan combine harvester dengan jumlah masing-masing alsintan tersebut sebanyak 4 (empat) unit. Hal ini diharapkan agar dapat menggerakkan kegiatan tanam dan panen serempak. Saat ini, kegiatan brigade alsintan dilakukan di tingkat desa dengan menggerakkan alsintan yang ada di lokasi terdekat.




Gambar 4.
Kegiatan Brigade Alat dan Mesin Pertanian

- 5. Pelatihan dan Pendidikan**
Pelatihan dan pendidikan diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan (skill) baik petugas UPT maupun UPJA. Pelatihan aspek manajemen ditujukan untuk calon manajer UPJA dalam hal pengelolaan UPJA yang profesional. Pelatihan teknis perbengkelan ditujukan kepada teknis dalam hal pemahaman aspek dan peningkatan keterampilan operasional perbengkelan (pemeliharaan dan perbaikan ringan maupun berat) alsintan. Sedangkan pelatihan teknis operasional alat, pemeliharaan/perawatan alsintan diperlukan bagi para operator.

Dalam menyusun perencanaan pelatihan, UPT melakukan konsultasi dan koordinasi ke berbagai stakeholder, antara lain yaitu Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Mekanisasi Pertanian di Serpong, Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia (PEPI), UPTD Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian Provinsi Jawa Barat, Politeknis dan Pengembangan Pertanian (Polbangan) Bogor dan tentunya Kementerian Pertanian RI. Selain itu, UPT Pertanian juga melakukan edukasi dan demonstrasi alsintan bersama-sama dengan pabrik alsintan sebagai salah satu upaya meningkatkan inovasi teknologi.



Gambar 5.
Edukasi dan Demonstrasi Alat dan Mesin Pertanian

Title	Al Muktabar Pamer Keberhasilan	 Kementerian Pertanian
Date	5 Oktober 2023	
Media	Radar Banten	
Page	1 Part 1	
Author	Nna-suf	


Al Muktabar Pamer Keberhasilan

SAAT rapat paripurna istimewa HUT ke 23 Provinsi Banten, Pj Gubernur Banten Al Muktabar pamer sejumlah keberhasilan Pemprov Banten. Ia memaparkan sejumlah capaian kinerja pembangunan yang sudah dilakukannya di depan seluruh anggota dan pimpinan DPRD Provinsi Banten serta tamu undangan yang hadir pada rapat paripurna istimewa tersebut.

► *Kè hal. 7*



Al Muktabar

Title	Al Muktabar Pamer Keberhasilan	 Kementerian Pertanian
Date	5 Oktober 2023	
Media	Radar Banten	
Page	1 Part 2	
Author	Nna-suf	

Al Muktabar Pamer...

Dari hlm 1

Pertama, Al mengaku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau pengeluaran per kapita masyarakat di Provinsi Banten tumbuh dengan cepat. Pada tahun 2007 sebesar Rp13,03 juta naik menjadi Rp60,99 juta pada tahun 2022. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Banten tahun 2023 ditargetkan pada kisaran 5,02 sampai 5,15 persen. Namun pada triwulan II 2023 sudah mengalami pertumbuhan sebesar 4,83 persen (y-on-y). "Artinya target itu kita optimis bisa capai, bahkan bisa melampaui," ujarnya.

Begitu pula kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Banten. Ia mengaku pada tahun 2022 mengalami perbaikan yang ditandai dengan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dari 8,98 persen pada tahun 2021 menjadi 7,97 persen pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan pemulihan aktivitas perekonomian yang berdampak pada penguatan penyerapan tenaga kerja.

Selanjutnya, tingkat kemiskinan di Provinsi Banten juga mengalami perbaikan dari tahun 2007 sebesar 9,07 persen menjadi 6,17 persen pada Maret 2023. Capaian tersebut masih lebih baik dari tingkat kemiskinan nasional sebesar 9,36 persen.

Kemudian, gini ratio pada tahun 2007 sebesar 0,370 menjadi 0,368 pada tahun 2023. "Kondisi itu lebih baik dibandingkan kondisi ketimpangan nasional dengan tingkat gini ratio sebesar 0,388 poin," ujarnya. Demikian juga dengan pembangunan manusia di Banten yang secara konsisten terus mengalami kemajuan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Banten mengalami peningkatan yang luar biasa. Pada tahun 2007 sebesar 61,14 persen dan pada tahun 2022, IPM Banten telah mencapai 73,32 poin atau meningkat 0,60 poin dibandingkan tahun 2021 sebesar 72,72 poin.

"Capaian itu berada lebih tinggi bila dibandingkan dengan capaian IPM nasional yang sebesar 72,91 poin. Angka tersebut menempati peringkat delapan nasional," pungkasnya.

Berkenaan dengan kemarau panjang akibat dari El Nino, dijelaskan Al Muktabar, kondisi terkini Banten yang terdampak kekeringan per 22 September 2023 mencapai 4.722 hektare atau 1,02 persen dari total luas tanam dengan luasan 463.613 hektare. Dengan rincian kekeringan ringan 1.789 hektare, kekeringan sedang 1.532 hektare, kekeringan berat 887 hektare, dan puso 514 hektare.

Atas kondisi itu, Pemprov Banten senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat, dengan melakukan berbagai langkah antisipasi seperti menyalurkan cadangan

pangan pemerintah sebesar 214,99 ton beras yang bersumber dari dana insentif daerah sebesar 2.139,17 ton beras yang siap disalurkan apabila masyarakat sudah membutuhkan.

Selain itu, peningkatan ketersediaan air dengan membangun/memperbaiki embung, dam, parit, sumur pantek, power thresher, sumur resapan, dan pompanisasi serta pengelolaan jaringan irigasi sepanjang 361,3 kilometer dengan luas layanan 29,211 hektare serta dukungan pembiayaan KUR dan asuransi pertanian, dan penyiapan lumbung pangan. "Provinsi Banten juga memiliki pangan lokal seperti jagung, pisang, porang, singkong, talas beneng, sukun dan ubi jalar," ujarnya.

DEWAN BERI CATATAN

DPRD Banten memberikan catatan khusus terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten yang kini telah berusia 23 tahun.

Ketua DPRD Banten, Andra Soni mengatakan, catatan-catatan dari DPRD merupakan masukan untuk pelaksanaan Pemerintahan yang lebih baik itu. Catatan itu ditunjukkan untuk semua unsur di Pemprov Banten, tidak terkecuali Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar.


"Ya tentu harapan pasti selalu ada sesuai dengan tujuan pendirian Provinsi Banten itu adalah bagaimana memajukan masyarakat Banten, dan memandirikan masyarakat," ujarnya saat ditemui usai memimpin rapat paripurna istimewa HUT Banten di Gedung Paripurna DPRD Banten, Kota Serang, Rabu (4/10).

Menurutnya, pemerintahan di Provinsi Banten mengalami kemajuan, namun terdapat beberapa catatan khusus yang perlu dibenahi dalam menjalankan roda pemerintahan, diantaranya yakni tingginya angka pengangguran, pelayanan kesehatan, dan pendidikan.

"Pemerintahan di Banten sudah maju, namun satu sisi kita juga harus mengingat bahwa PR masih banyak berupa angka pengangguran yang masih tinggi dan kemudian juga apa akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan yang layak pun masih sangat menjadi PR," ungkapnya.

Ketua DPD Gerindra Banten ini pun berharap Pemprov Banten melalui estafet kepemimpinannya dapat menyelesaikan berbagai persoalan itu guna mewujudkan Banten maju, dan berdaya saing.

"Harapan kami adalah kepemimpinan berikut mampu melanjutkan dan kemudian meningkatkan serta memastikan bahwa kesejahteraan masyarakat Banten itu tercapai," pungkasnya. (nna-suf)

Title	PENINGKATAN PRODUKSI KOMODITAS PERTANIAN MELALUI PELAYANAN MEKANISASI PERTANIAN DI KAB. BOGOR	 Kementerian Pertanian
Date	5 Oktober 2023	
Media	Metropolitan Bogor	
Page	12	
Author	Metropolitan Bogor	

DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BOGOR



PENINGKATAN PRODUKSI KOMODITAS PERTANIAN MELALUI PELAYANAN MEKANISASI PERTANIAN DI KAB. BOGOR



TATANG MULYADI, SP, M.Si

Pt. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor

Wilayah X Jonggol dengan wilayah kerja sebanyak 13 Kecamatan. UPT Pertanian ini telah melakukan jasa pelayanan kepada kelompok tani/Gapoktan/UPJA sebagai berikut:

- 1. Pembentukan Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA)**
Unit Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian yang selanjutnya disebut UPJA merupakan suatu lembaga ekonomi pedesaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa dalam rangka optimalisasi penggunaan alat dan mesin pertanian untuk mendapatkan keuntungan usaha baik di dalam maupun di luar kelompok tani/Gapoktan. UPJA dibentuk sebagai bagian dari unit pelayanan kelompok tani/Gapoktan yang sudah terbentuk melalui Simluhan, namun demikian pembentukan UPJA ini diprioritaskan pada Poktan/Gapoktan yang memiliki minimal 3 unit alat dan mesin pertanian dan berlokasi di sentra pertanian. Pembentukan UPJA ini sangat penting guna mendafta alat dan mesin pertanian yang didistribusikan pada kelompok tani setiap tahun. Pada tahun ini sudah terbentuk 45 UPJA sesuai SK Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor Nomor: 500.6.8/14351-luh Tanggal 25 Juli 2023.
Pada awal tahun pembentukan, UPT Pertanian memberikan pengetahuan dasar mengenai UPJA dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian Pertanian RI, UPTD Mektan Provinsi Jawa Barat, serta UPJA Tbas Cianjur yang sudah berhasil menjadikan UPJA menjadi profesional. Kelembagaan UPJA juga diarahkan untuk dapat membuat AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) yang dapat dijadikan pedoman dalam pengelolaan UPJA masing-masing.



Gambar 1. Pertemuan UPJA Pembahasan AD/ART

- 2. Pemeliharaan Alsintan**
Pemeliharaan traktor adalah tindakan merawat mesin atau peralatan pabrik dengan memperbaharui umur masa pakai dan kerusakan mesin. Perawatan berkala didasarkan pada jam kerja mesin (HM), biasanya mengikuti rekomendasi dari pihak pembuat mesin, secara umum dapat diuraikan sebagai berikut : Perawatan berkala 50 jam, Perawatan berkala 100 jam, Perawatan berkala 200 jam, Perawatan berkala 300 jam, hingga Perawatan berkala 2 tahun.
Pemeliharaan dan perawatan ini sangat penting dilakukan oleh semua operator alsintan agar umur ekonomis alsintan berlangsung lama. Kondisi saat ini, masih banyak operator yang belum memahami



Gambar 2. Bimbingan Teknis Pemeliharaan Alsintan

- 3. Perbaikan Kerusakan Alsintan**
Pelayanan service kerusakan ini dilakukan setelah mendapat laporan dari kelompok tani adanya alsintan yang rusak, setelah itu dilakukan pengecekan ke lokasi, hasil pengecekan dicatat dalam laporan kerusakan, bila kerusakan alsintan ringan maka alsintan langsung diperbaiki di lokasi oleh petugas teknis UPT, namun bila hasil kerusakan berat maka UPT membuat surat rekomendasi untuk dilakukan perbaikan alsintan di bengkel resmi. Saat ini, UPT Pertanian telah menyediakan suku cadang untuk memfasilitasi perbaikan alsintan kurang lebih sekitar 10 unit alsintan dengan penyediaan yang masih terbatas. Namun demikian, pelayanan perbaikan ini telah dirasakan sebagian besar petani melalui UPJA di masing-masing daerah.
Untuk mempermudah pelayanan dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan para teknis maupun operator UPJA, maka UPT menyiapkan para teknis UPJA yang dapat memperbaiki alsintan dengan kondisi rusak ringan melalui pelatihan perbengkelan alsintan yang bekerja sama dengan Polbangktan Bogor, BB Mektan Cibeas Cianjur dan ahli teknis lainnya yang berasal dari penyedia alat dan mesin perbengkelan.



Gambar 3. Kegiatan Perbaikan Alsintan di Poktan/Gapoktan/UPJA

- 4. Pengelolaan Brigade Alsintan**
Brigade alsintan bertujuan memberikan layanan




Gambar 4. Kegiatan Brigade Alat dan Mesin Pertanian

- 5. Pelatihan dan Pendidikan**
Pelatihan dan pendidikan diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan (skill) baik petugas UPT maupun UPJA. Pelatihan aspek manajemen ditujukan untuk calon manajer UPJA dalam hal pengelolaan UPJA yang profesional. Pelatihan teknis perbengkelan ditujukan kepada teknis dalam hal pemahaman aspek dan peningkatan keterampilan operasional perbengkelan (pemeliharaan dan perbaikan ringan maupun berat) alsintan. Sedangkan pelatihan teknis operasional alat, pemeliharaan/perawatan alsintan diperlukan bagi para operator.
Dalam menyusun perencanaan pelatihan, UPT melakukan konsultasi dan koordinasi ke berbagai stakeholder, antara lain yaitu Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Mekanisasi Pertanian di Serpong, Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia (PEPI), UPTD Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian Provinsi Jawa Barat, Politeknis dan Pengembangan Pertanian (Polbangtan) Bogor dan tentunya Kementerian Pertanian RI. Selain itu, UPT Pertanian juga melakukan edukasi dan demonstrasi alsintan bersama-sama dengan pabrikkan alsintan sebagai salah satu upaya meningkatkan inovasi teknologi



Gambar 5. Edukasi dan Demonstrasi Alat dan Mesin Pertanian

Title	Petani Gagal Panen Akan Diganti Rugi	 Kementerian Pertanian
Date	5 Oktober 2023	
Media	Banten Pos	
Page	3	
Author	Dhe/Pen	

Petani Gagal Panen Akan Diganti Rugi

PANDEGLANG, BANPOS - Para petani di Kabupaten Pandeglang yang mengalami gagal panen akibat kemarau panjang akan mendapatkan ganti rugi melalui Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) sebesar Rp 6 juta per hektare. Bantuan tersebut diberikan hanya kepada petani yang mengasuransikan tanaman padinya.

Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Pandeglang, Uun Junanda mengatakan, pihaknya saat ini sedang menerjunkan tim untuk melakukan pemeriksaan terhadap tanaman padi milik petani yang terkena dampak kekeringan.

"Kita periksa dan kita pantau. Kalau memang benar gagal panen, bakal kita

berikan ganti rugi melalui asuransi," kata Uun kepada wartawan, Rabu (4/10).

Uun memastikan, bantuan ganti rugi tersebut hanya diberikan kepada para petani yang mengikuti AUTP, sedangkan yang tidak masuk dalam program tersebut tidak akan mendapatkan ganti rugi.

"Iya hanya untuk yang mengikuti asuransi itu, kalau tidak ya enggak bisa. Karena kan program itu memang untuk melindungi petani," ucapnya.

Dijelaskannya, setiap anggota yang masuk dalam program AUTP diwajibkan membayar iuran sebesar Rp180 ribu per hektare. Akan tetapi, pemerintah daerah mensubsidi bantuan itu, sehingga para petani hanya membayar

sebesar Rp 36 ribu per hektare.

"Petani yang masuk asuransi ini, nantinya akan mendapatkan ganti rugi Rp 6 juta per hektare," ujarnya.

Uun menambahkan, secara keseluruhan lahan pertanian di Pandeglang lebih dari 56 ribu hektare, namun yang tercatat sebagai anggota AUTP baru dua ribu hektare. Padahal, pada tahun 2022, Pandeglang ditargetkan 20 ribu hektare lahan oleh Pemerintah Pusat.

"Belum sampai satu persen yang mengikuti program AUTP, padahal kalau terjadi bencana, para petani bisa mendapatkan ganti rugi atas lahan yang terkena dampak bencana. Kalau tidak ikut dalam program itu, para petani tidak bisa mendapatkan

ganti rugi sama sekali," jelasnya.

Menurutnya, hingga saat ini ada sebanyak 1.300 hektare lebih sawah petani yang mengalami kekeringan akibat kemarau. Saat ini pihaknya sedang melakukan pendataan sawah yang terancam puso.

"Kita masih melakukan pendataan berapaluasan sawah yang kemungkinan puso," ungkapnya.


Terpisah, Ketua Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Pandeglang, Anton Haerul Samsi mengajak kepada semua petani di Kabupaten Pandeglang agar bisa mengikuti program AUTP tersebut. Tujuannya, agar tanaman padi yang gagal panen akibat kemarau, serangan hama, banjir, dan

lainnya bisa mendapatkan ganti rugi.

"Semua petani harus bisa mengikuti program itu, meskipun ada iuran atau bayaran. Tetapi kan sudah disubsidi oleh pemerintah. Dengan program itu, tentunya kerugian petani tidak terlalu besar saat gagal panen," katanya.

Anton juga meminta kepada pihak dinas agar terus melakukan asuransi mengenai program tersebut kepada para petani. Karena pada saat terjadi gagal panen, para petani akan sangat dirugikan.

"Harus terus dioptimalkan sosialisasi dan pemberian pemahaman program AUTP. Karena tidak menutup kemungkinan banyak petani yang kurang mengetahui program itu," ungkapnya. (DHE/PBN)

Title	September, NTP Sumut Naik 2,61	 Kementerian Pertanian
Date	5 Oktober 2023	
Media	Analisa	
Page	9	
Author	Tiwi	

September, NTP Sumut Naik 2,61%

Medan, (Analisa)

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara (BPSSumut) menyampaikan bahwa berdasarkan pemantauan harga-harga perdesaan di Provinsi Sumut pada September 2023, Nilai Tukar Petani (NTP) Sumut tercatat mengalami kenaikan sebesar 2,61% dibandingkan Agustus 2023, yaitu dari 122,99 menjadi 126,20.

“Kenaikan NTP September 2023 disebabkan oleh naiknya NTP tiga subsektor, yaitu NTP subsektor Tanaman Pangan sebesar 2,82%, NTP subsektor Hortikultura sebesar 0,66% dan NTP subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 3,44%. Sementara itu, NTP dua subsektor lainnya mengalami penurunan, yaitu NTP subsektor Peternakan sebesar 0,84 persen dan NTP subsektor Perikanan sebesar 0,34%,” pungkas Kepala BPSSumut, Nurul Hasanudin, Rabu (4/10).

Dikatakannya, Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) Sumut pada September 2023 mengalami kenaikan sebesar 2,62%. Hal itu karena indeks harga yang diterima petani (It) naik sebesar 2,75% dan indeks BPPBM naik sebesar 0,13%.

“Kenaikan NTUP disebabkan oleh naiknya NTUP tiga subsektor, yaitu NTUP subsektor tanaman pangan sebesar 2,76%, NTUP subsektor hortikultura sebesar 0,81%, dan NTUP subsektor tanaman perkebunan rakyat sebesar 3,44%. Sementara itu, NTUP dua subsektor lainnya mengalami penurunan, yaitu NTUP subsektor peternakan sebesar 0,75% dan NTUP subsektor perikanan sebesar 0,21%,” tandasnya.


Nurul mengatakan, survei harga produsen gabah di Sumut pada September 2023 telah mencatat 83 observasi transaksi penjualan gabah

di 13 kabupaten terpilih dengan komposisi terbanyak didominasi oleh Gabah Kering Giling (GKG) sebanyak 30 observasi (36,14%), disusul Gabah Luar Kualitas sebanyak 27 observasi (32,53%) dan Gabah Kering Panen (GKP) sebanyak 26 observasi (31,33%).

“Di tingkat petani pada September, harga gabah tertinggi senilai Rp7.200 per kg berasal dari gabah kualitas GKG varietas Ciherang di Kabupaten Asahan. Sedangkan harga terendah senilai Rp5.300 per kg berasal dari Gabah kualitas GKP varietas Inpari 32 dari Kabupaten Simalungun. Ditingkat penggilingan pada September, harga gabah tertinggi senilai Rp7.300 per kg berasal dari gabah kualitas GKG varietas Ciherang di Kabupaten Asahan. Sedangkan harga terendah senilai Rp5.350 per kg berasal dari Gabah kualitas GKP varietas Inpari 32 dari Kabupaten Simalungun,” tukasnya.

Rata-rata harga gabah kelompok kualitas Gabah Kering Giling (GKG) di tingkat petani, sambungnya, mengalami kenaikan sebesar 0,07% dari Rp6.454 per kg pada Agustus menjadi Rp6.459 per kg pada September. Kelompok kualitas Gabah Kering Panen (GKP) juga mengalami kenaikan sebesar 0,54% dari bulan sebelumnya yaitu dari Rp6.007 per kg menjadi Rp6.039 per kg.

“Rata-rata harga gabah kelompok kualitas Gabah Kering Giling (GKG) di tingkat penggilingan tidak mengalami perubahan harga dari bulan Agustus ke bulan September yaitu sebesar Rp6.604 per kg. Sedangkan kelompok kualitas Gabah Kering Panen (GKP) mengalami kenaikan sebesar 1,42% dari bulan sebelumnya yaitu dari Rp6.162 per kg menjadi Rp6.250 per kg,” tutupnya. (tiwi)


Title	Al Muktabar pamer keberhasilan	 Kementerian Pertanian
Date	5 Oktober 2023	
Media	Radar Banten	
Page	1 Part 1	
Author	Nda/Suf	

Al Muktabar Pamer Keberhasilan

SAAT rapat paripurna istimewa HUT ke 23 Provinsi Banten, Pj Gubernur Banten Al Muktabar pamer sejumlah keberhasilan Pemprov Banten. Ia memaparkan sejumlah capaian kinerja pembangunan yang sudah dilakukannya di depan seluruh anggota dan pimpinan DPRD Provinsi Banten serta tamu undangan yang hadir pada rapat paripurna istimewa tersebut.

► *Ke hal. 7*



Title	Al Muktabar pamer keberhasilan	 Kementerian Pertanian
Date	5 Oktober 2023	
Media	Radar Banten	
Page	1 Part 2	
Author	Nda/Suf	

Al Muktabar Pamer...

Dari hlm 1

Pertama, Al mengaku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau pengeluaran per kapita masyarakat di Provinsi Banten tumbuh dengan cepat. Pada tahun 2007 sebesar Rp13,03 juta naik menjadi Rp60,99 juta pada tahun 2022. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Banten tahun 2023 ditargetkan pada kisaran 5,02 sampai 5,15 persen. Namun pada triwulan II 2023 sudah mengalami pertumbuhan sebesar 4,83 persen (y-on-y). "Artinya target itu kita optimis bisa capai, bahkan bisa melampaui," ujarnya.

Begitu pula kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Banten. Ia mengaku pada tahun 2022 mengalami perbaikan yang ditandai dengan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dari 8,98 persen pada tahun 2021 menjadi 7,97 persen pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan pemulihan aktivitas perekonomian yang berdampak pada penguatan penyerapan tenaga kerja.

Selanjutnya, tingkat kemiskinan di Provinsi Banten juga mengalami perbaikan dari tahun 2007 sebesar 9,07 persen menjadi 6,17 persen pada Maret 2023. Capaian tersebut masih lebih baik dari tingkat kemiskinan nasional sebesar 9,36 persen.

Kemudian, gini ratio pada tahun 2007 sebesar 0,370 menjadi 0,368 pada tahun 2023. "Kondisi itu lebih baik dibandingkan kondisi ketimpangan nasional dengan tingkat gini ratio sebesar 0,388 poin," ujarnya. Demikian juga dengan pembangunan manusia di Banten yang secara konsisten terus mengalami kemajuan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Banten mengalami peningkatan yang luar biasa. Pada tahun 2007 sebesar 61,14 persen dan pada tahun 2022, IPM Banten telah mencapai 73,32 poin atau meningkat 0,60 poin dibandingkan tahun 2021 sebesar 72,72 poin.

"Capaian itu berada lebih tinggi bila dibandingkan dengan capaian IPM nasional yang sebesar 72,91 poin. Angka tersebut menempati peringkat delapan nasional," pungkasnya.

Berkenaan dengan kemarau panjang akibat dari El Nino, dijelaskan Al Muktabar, kondisi terkini Banten yang terdampak kekeringan per 22 September 2023 mencapai 4.722 hektare atau 1,02 persen dari total luas tanam dengan luasan 463.613 hektare. Dengan rincian kekeringan ringan 1.789 hektare, kekeringan sedang 1.532 hektare, kekeringan berat 887 hektare, dan puso 514 hektare.

Atas kondisi itu, Pemprov Banten senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat, dengan melakukan berbagai langkah antisipasi seperti menyalurkan cadangan

pangan pemerintah sebesar 214,99 ton beras yang bersumber dari dana insentif daerah sebesar 2.139,17 ton beras yang siap disalurkan apabila masyarakat sudah membutuhkan.

Selain itu, peningkatan ketersediaan air dengan membangun/memperbaiki embung, dam, parit, sumur pantek, power thresher, sumur resapan, dan pompanisasi serta pengelolaan jaringan irigasi sepanjang 361,3 kilometer dengan luas layanan 29,211 hektare serta dukungan pembiayaan KUR dan asuransi pertanian, dan penyiapan lumbung pangan. "Provinsi Banten juga memiliki pangan lokal seperti jagung, pisang, porang, singkong, talas beneng, sukun dan ubi jalar," ujarnya.

DEWAN BERI CATATAN

DPRD Banten memberikan catatan khusus terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten yang kini telah berusia 23 tahun.

Ketua DPRD Banten, Andra Soni mengatakan, catatan-catatan dari DPRD merupakan masukan untuk pelaksanaan Pemerintahan yang lebih baik itu. Catatan itu ditunjukkan untuk semua unsur di Pemprov Banten, tidak terkecuali Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar.


"Ya tentu harapan pasti selalu ada sesuai dengan tujuan pendirian Provinsi Banten itu adalah bagaimana memajukan masyarakat Banten, dan memandirikan masyarakat," ujarnya saat ditemui usai memimpin rapat paripurna istimewa HUT Banten di Gedung Paripurna DPRD Banten, Kota Serang, Rabu (4/10).

Menurutnya, pemerintahan di Provinsi Banten mengalami kemajuan, namun terdapat beberapa catatan khusus yang perlu dibenahi dalam menjalankan roda pemerintahan, diantaranya yakni tingginya angka pengangguran, pelayanan kesehatan, dan pendidikan.

"Pemerintahan di Banten sudah maju, namun satu sisi kita juga harus mengingat bahwa PR masih banyak berupa angka pengangguran yang masih tinggi dan kemudian juga apa akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan yang layak pun masih sangat menjadi PR," ungkapnya.

Ketua DPD Gerindra Banten ini pun berharap Pemprov Banten melalui estafet kepemimpinannya dapat menyelesaikan berbagai persoalan itu guna mewujudkan Banten maju, dan berdaya saing.

"Harapan kami adalah kepemimpinan berikut mampu melanjutkan dan kemudian meningkatkan serta memastikan bahwa kesejahteraan masyarakat Banten itu tercapai," pungkasnya. (nda-suf)

Title	Oktober Masa Puncak El Nino	 Kementerian Pertanian
Date	5 Oktober 2023	
Media	Radar Banyumas	
Page	10	
Author	Jpc	



AKTIVITAS:
Warga beraktivitas di anjungan Transjakarta saat cuaca terik di kawasan Bundaran HI, Jakarta.

JAWAPOS

Oktober Masa Puncak El Nino

Dampak Diprediksi Menurun Bulan Depan

JAKARTA - Risiko kekeringan, kesusahan air bersih, gagal panen, hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terjadi sebagai efek fenomena El Nino. Dalam rapat terbatas (ratas) kemarin (3/10), Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan dampak-dampak tersebut bisa teratasi.

Berdasar keterangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), puncak El

Nino terjadi pada September lalu. Namun, dari pengamatan satelit, Oktober ini masih masa puncak.

Pada November, dampaknya diprediksi akan berkurang karena sudah memasuki masa transisi ke musim hujan. "El Nino masih masuk moderat sampai akhir tahun dan berakhir di Maret," papar Kepala BMKG Dwikorita Karnawati.

Indonesia bagian selatan khatulistiwa, menurut Dwikorita, akan terdampak paling lama. Saat di beberapa daerah di utara khatulistiwa

sudah hujan, wilayah di selatan khatulistiwa belum terbentuk awan. Sehingga hujan belum akan turun. "Kalau diprediksi, baru awal November di Jawa, Nusa Tenggara, sampai Papua (yang terbentuk awan, Red)," terang dia.


Ditemui se usai ratas di istana kepresidenan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengungkapkan, hingga saat ini 60 hingga 80 persen embung masih efektif untuk mengairi pertanian. Di sisi lain, karhutla masih terjadi. Hingga 2 Oktober, terpantau

ada 6.659 hot spot. Sebanyak 80 persennya berpeluang menjadi fire spot atau titik api. "Perkiraan saya, dengan situasi di September dan Oktober, akan bertambah," katanya.

Siti mengungkapkan, sejak 28 September tim pengendali karhutla berjibaku mengendalikan titik api di Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Riau dan Jambi juga termasuk yang dimonitor. Siti menjamin hingga kini tidak ada asap yang menyeberang ke negara tetangga seperti Malaysia.

Koordinator Laboratorium Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) BRIN Budi Harsoyo menjelaskan, misi TMC saat ini fokus untuk mengatasi karhutla di Sumatera dan Kalimantan. Belum ada rencana untuk wilayah Jawa.

Terkait produktivitas pangan, Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Suwandi mengatakan, sejumlah upaya telah dilakukan. "Langkah penanganan yang dilakukan disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah," ucap dia. (jpc)

Title	Produk Impor Masuk RI Harus SNI	 Kementerian Pertanian
Date	5 Oktober 2023	
Media	Pos Kota	
Page	9	
Author	Wanto/yh	



Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

Produk Impor Masuk RI Harus SNI

JAKARTA (Poskota) - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, produk impor yang masuk tanah air nantinya harus memenuhi kriteria Standar Nasional Indonesia (SNI).

Untuk makanan dan kosmetik juga harus mencantumkan sertifikat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Dari BPOM ini layak atau tidak, kemudian HS (Harmonized System Code) number-nya cocok apa tidak, jangan sampai barangnya A HS-nya tapi produknya beda gitu," kata Zulhas dalam keterangannya, Rabu, (4/10).

Zulhas menambahkan, daftar barang yang diperbolehkan impor (positive list) tengah digodok dan diputuskan oleh beberapa kementerian dan lembaga terkait.

"Positive list akan dirapatkan dari Kementerian Koperasi dan UKM dan kementerian lainnya, baru kita sampaikan," ujarnya.

Kementerian Perdagangan, kata dia, tidak bisa sendirian dalam menetapkan daftar barang yang diizinkan untuk impor.

Sebab, barang-barang impor juga berhubungan erat dengan kementerian lain seperti Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian dan lainnya.

Zulkifli mengatakan, Peraturan Menteri Perda-

gangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 terkait dengan Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik merupakan bukti bahwa pemerintah hadir untuk melindungi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Dengan adanya pemisahan antara sosial media dengan social commerce dan penetapan harga minimum sebesar 100 dolar AS per unit untuk barang jadi asal luar negeri yang langsung dijual oleh Pedagang (merchant) ke Indonesia melalui platform e-commerce lintas negara, tidak lagi membuat pelaku UMKM terperosok.

"UMKM bisa berkembang kalau ekosistemnya mendukung, kalau tidak, ya tidak berkembang," ujarnya.

Sebelumnya, Zulkifli mengatakan, TikTok Shop telah bersedia untuk mengikuti peraturan pemerintah terkait dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 perihal perdagangan elektronik.

Menurut Zulkifli, TikTok tidak akan diberikan kelonggaran terkait tenggat waktu penutupan TikTok Shop.


Apabila masih beroperasi dan melanggar peraturan, maka TikTok Shop akan disanksi. (Wanto/yh)

Title	BONGKAR MUAT KEDELAI IMPOR	
Date	5 Oktober 2023	
Media	Neraca	
Page	11	
Author	Neraca/Antarafoto/Budi Candra Setya/foc	



NERACA/Antarafoto/Budi Candra Setya/foc

BONGKAR MUAT KEDELAI IMPOR : Kapal bermuatan kedelai melakukan bongkar muat di Pelabuhan Tanjungwangi, Banyuwangi, Jawa Timur, Rabu (4/10/2023). Data Pelindo multi terminal Tanjungwangi menyebutkan sebanyak 8 ribu ton kedelai impor dari Amerika oleh PT FKS Multi Agro tersebut memulai proses bongkar di Pelabuhan Tanjungwangi.

Title	Bulog Dibatasi HPP untuk GKP Rp 5.000/Kg	 Kementerian Pertanian
Date	5 Oktober 2023	
Media	Neraca	
Page	1	
Author	Bari/mohar/fha	

ALASAN TIDAK MENYERAP GABAH LOKAL:

Bulog Dibatasi HPP untuk GKP Rp 5.000/Kg

Jakarta-Dirut Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) mengungkapkan, alasan pihaknya tidak menyerap gabah petani lokal. Menurut dia, Bulog lebih banyak menyerap beras dari impor lantaran pihaknya dibatasi ketentuan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen (GKP) sebesar Rp 5.000 per kg.

■ NERACA

Sementara harga GKP di tingkat petani lokal saat ini menembus Rp 7.400 hingga Rp 7.600 per kg. "Di satu sisi, kami lihat ada keuntungan petani yang menikmati harga tinggi. Karena itu Bulog tidak menyerap gabah petani," ujar Buwas saat ditemui di Pasar Induk Beras Cipinang (PICB), Jakarta, Rabu (4/10).

Oleh sebab itu, Bulog kini menggunakan beras hasil impor untuk menstabilkan harga. Impor beras tahun ini sebanyak 2 juta ton dilakukan untuk menambah pasokan cadangan beras pemerintah (CBP). Dengan begitu, ketika harga beras naik, pemerintah dapat menggelontorkan stok tersebut untuk menekan inflasi.

Menurut Buwas, Presiden Jokowi telah mengambil keputusan impor untuk membanjiri stok agar harga beras bisa segera melandai. Menurut Buwas, pemerintah telah melakukan rapat terbatas atau ratas untuk membahas rencana impor ini. "Jadi kalau gabah, memang Bulog tidak menyerap gabah, walaupun punya pabrik beras. Beras impor ini kami kendalikan di pasar melalui operasi pasar SPHP," ujar Buwas.

Adapun Badan Pangan Nasional (Bapanas), tutur Buwas, telah memberikan Bulog kuota impor sesuai selisih jumlah kebutuhan dan produksi di Tanah Air. "Kemarini Presiden sudah kerja sama dengan Presiden China. China siap menyiapkan 1 juta ton untuk diimpor ke Indonesia," kata Buwas.

Akan tetapi, menurut dia, pemerintah akan memastikan terlebih dahulu jumlah kebutuhan dan produksi di dalam negeri. Sehingga impor tetap dilakukan ketika terjadi kondisi darurat atau pasokan dari petani lokal tidak mencukupi. "Jadi itu kita tidak ketergantungan dari negara-negara lain," kata Buwas.

Menurut dia, impor beras dilakukan untuk mengantisipasi dampak El Nino terhadap cadangan

an beras di gudang Bulog. Buwas menjelaskan akibat fenomena alam itu, diprediksi panen padi akan mundur atau tidak ada sama sekali pada Januari hingga Maret. Karenanya, pemerintah menyiapkan opsi impor agar penambahan stok tidak terlambat.

Sementara itu, Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhammad Suyanto mengungkapkan alasan pemerintah mempertimbangkan impor beras dari Cina. Dia menjelaskan pemerintah sebetulnya mempertimbangkan semua negara penghasil beras untuk dijadikan sebagai negara pemasok beras ke Indonesia.

Namun saat ini China yang memiliki jumlah pasokan yang cukup. "China ini masih nunggulagi, sampai sekarang ya pasokan mereka sih siap, tapi dari harga masih belum (disepakati)," kata Suyanto seperti dikutip *Tempo.co*, kemarin (4/10).

Suyanto menuturkan ada dua pertimbangan dalam memilih negara asal impor beras. Yakni soal ketersediaan pasokan dan harga yang kompetitif. Saat ini, pemerintah telah menjajaki impor dari China. Menurut dia, China telah menyatakan siap memasok beras untuk Indonesia, tetapi harga yang ditawarkan belum sesuai. Terlebih biaya transportasi dari China juga lebih tinggi dibandingkan dari negara-negara Asia Tenggara.

Indonesia, menurut dia, memang sudah hampir 5 tahun tidak mengimpor dari China. Belakangan pemerintah lebih memilih Vietnam, Thailand, dan Myanmar. Namun, menurut dia, Indonesia tak boleh hanya bergantung pada satu negara saja untuk impor beras. Sebab, harga yang ditawarkan nantinya bakal naik. "Pasar beras dunia kan terbatas, jadi kalau Indonesia ambil banyak dari satu negara, pasti harganya akan naik," tutur Suyanto.

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso alias Buwas juga mengatakan pemerintah telah melakukan rapat terbatas atau Ratas un-

tuk membahas rencana impor ini. Menurut dia, Bapanas telah memberikan Bulog kuota impor dari Bapanas sesuai selisih jumlah kebutuhan dan produksi.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengungkapkan pihaknya telah menghitung impor beras tambahan sebesar 1,5 juta ton. Menurut dia, impor tersebut akan dilakukan apabila produksi lokal tidak mencukupi kebutuhan. "Setelah November ditambah (impor) 1,5 juta ton. Kalau memang kurang, kenapa enggak? Pilih mana punya stok atau tidak punya stok?" ujarnya, kemarin.

Arief mengatakan tugas penambahan impor beras dari Presiden Jokowi logis. Pasalnya, produksi di dalam negeri merosot akibat kekeringan ekstrem fenomena El Nino. Kementerian Pertanian mencatat produksi beras di Indonesia turun sekitar 5 persen akibat kondisi tersebut.

Menurut dia, impor beras akan dilakukan secukupnya saja untuk mengimbangi kekurangan cadangan dari dalam negeri. Di samping itu, pemerintah akan terus mendorong peningkatan produktivitas petani di Tanah Air. Dia

mengatakan pemerintah masih terus melakukan penjajakan dengan negara-negara penghasil beras untuk mendapatkan impor. Salah satu negara yang sudah dijajaki adalah Cina. Sebelumnya Arief menyebut pemerintah tengah menjajaki impor beras dari Cina sebanyak 1 juta ton untuk kebutuhan cadangan beras tahun depan.

Konsumsi Non-Beras

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyarankan makanan non-beras sebagai makanan pokok non-beras, seperti ubi dan sorgum, untuk meniadakan harga beras yang naik. "Saran saya untuk kita semua, warga negara Indonesia, kuncinya selain stok adalah diversifikasi pangan," ujar Tito saat ditemui wartawan di Kemenkeu, Selasa (3/10).

Dengan begitu, masyarakat tidak hanya akan mengandalkan beras sebagai makanan pokok. Tapi juga makanan lain yang mengandung karbohidrat. Menurut dia, Indonesia memiliki banyak potensi makanan pokok yang berbeda. "Jadi ada papada, sagu, jagung, talas, yam, itu semua enak-enak itu. Ada ubi jalar, sorgum,


sukun, banyak sekali yang bisa menjadi bahan pokok dan itu sehat," kata mantan Kapolri ini.

Dia menuturkan, sebagian jenis beras mengandung gula. Hal tersebut menurut dia tidak bagus untuk kesehatan. "Bisa menjadi sumber penyakit diabetes melitus," ujarnya.

Tito menyebut, orang-orang kota justru mulai beralih ke makanan non-beras seperti ketela. Lebih lanjut, dia meminta kampanye beralih ke makanan pokok selain beras menjadi penting. "Agar masyarakat tidak bergantung kepada beras," tutur dia.

Harga beras per hari ini interpan-tau masih mengalami kenaikan. Menurut data harga pangan Bank Indonesia, harga beras kualitas bawah I naik 0,75 persen menjadi Rp 13.350 per kg, beras kualitas bawah II naik 0,77 persen menjadi Rp 13.100 per kg.

Sedangkan harga beras kualitas medium I naik 0,69 persen menjadi Rp 14.500 per kg, beras kualitas medium II naik 0,7 persen menjadi Rp 14.300 per kg, beras kualitas super I naik 0,96 persen menjadi Rp 15.850 per kg dan beras kualitas super II naik 0,33 persen menjadi Rp 15.200 per kg. @bari/mohar/fha

Title	Industri Kelapa Sawit Perlu Waspada	 Kementerian Pertanian
Date	5 Oktober 2023	
Media	Neraca	
Page	10	
Author	Gro	

Industri Kelapa Sawit perlu Waspada

NERACA

Bandung - Industri sawit kini sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja bahkan perlu kewaspadaan. Pasalnya, produksi minyak sawit dan kinerja ekspor Indonesia sedang mengalami stagnansi dalam beberapa tahun terakhir.

Eskalasi politik global juga memberikan tekanan pada harga komoditas penopang ekonomi Indonesia ini.

Di sisi lain, hambatan dalam negeri belum kunjung terselesaikan.

Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) M. Hadi Sugeng mengungkapkan, peningkatan konsumsi di pasar global yang diperkirakan akan terjadi dalam beberapa tahun kedepan tidak dibarengi dengan pertumbuhan produksi minyak

sawit, baik itu minyak sawit mentah (CPO) ataupun minyak kernel (PKO). Padahal Indonesia merupakan produsen sekaligus eksportir terbesar kelapa sawit dunia.

"Beberapa tahun belakangan produksi minyak sawit Indonesia stagnan di 51 juta ton, pun kinerja ekspor juga menurun. Meskipun volume ekspor meningkat di tahun ini, tapi nilainya menurun akibat harga," jelas Hadi Sugeng di Bandung.


Saat ini kelapa sawit Indonesia menguasai sekitar 58% pasar minyak nabati global dan lebih dari 40% pasar minyak kelapa sawit global.

Hadi Sugeng juga memaparkan problematika industri kelapa sawit Indonesia. Menurutnya, banyaknya masalah yang di-

hadapi akibat tumpang tindih kebijakan serta banyaknya instansi yang turut mengambil andil dalam pengambilan kebijakan industri kelapa sawit.

"Setelah kami petakan setidaknya 31 instansi pemerintah terlibat dalam pengambilan kebijakan, itu mulai dari daerah hingga pemerintah pusat," ujar Hadi Sugeng.

Contohnya, lanjut Hadi Sugeng, kasus identifikasi kawasan hutan dimana perusahaan sawit yang mulanya sudah dibagikan Hak Guna Usaha (HGU) atau petani yang memiliki Surat Hak Milik (SHM) juga diidentifikasi masuk kawasan hutan. Adapun penetapan melalui rekomendasi gubernur dan juga berbagai instansi terlibat. ●gro

Title	Lebak Siapkan Pompanisasi Cegah Gagal Panen Akibat Kekeringan	 Kementerian Pertanian
Date	5 Oktober 2023	
Media	Neraca	
Page	9	
Author	Ant	

Lebak Siapkan Pompanisasi Cegah Gagal Panen Akibat Kekeringan

NERACA

Lebak - Dinas Pertanian Kabupaten Lebak menyiapkan pompanisasi (proses pengairan lahan pertanian) pada ratusan hektare lahan pertanian yang terancam gagal panen akibat kekeringan.

Ratusan hektare tanaman padi di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten terancam gagal panen akibat dampak kemarau atau El Nino yang terjadi saat ini.

Kepala Bidang Produksi Dinas Pertanian Kabupaten Lebak Deni Iskandar di Lebak, dikutip Antara, kemarin, mengatakan, berdasarkan laporan Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) Provinsi Banten di daerah ini sekitar 300 hektare tanaman padi terjadi kekeringan dan terancam gagal panen.


Areal tanaman padi yang kekeringan itu tersebar di sejumlah kecamatan di Kabupaten Lebak. Luas areal tanaman padi yang mengalami kekeringan cukup besar hingga 300 hektare.

Karena itu, pihaknya untuk menyelamatkan tanaman padi tersebut dengan berkoordinasi bersama Pemerintah Provinsi Banten dan Kementerian Pertanian agar mendapatkan bantuan peralatan pertanian.

Selain itu mengoptimalkan pompanisasi di lokasi-lokasi yang memiliki sumber air permukaan untuk menyedot air dari aliran sungai.

Sedangkan di lokasi yang tidak terdapat sumber air permukaan dilakukan dengan sistem pompa pantek. Begitu juga diprioritaskan di daerah - daerah lain yang terdapat sumber air dipinjamkan pompanisasi.

"Kami berharap dengan upaya itu bisa diselamatkan tanaman padi di tengah El Nino itu," kata Deni. Sementara itu, Ahmad (60) seorang petani di Blok Kanaga Warunggunung Kabupaten Lebak mengatakan sekitar 20 hektar tanaman padi di sini yang usia tanam rata - rata 30 hari setelah tanam terjadi kekeringan dan dipastikan gagal panen karena tidak memiliki sumber air permukaan. "Kami berharap gagal panen akibat El Nino itu dapat bantuan benih dari pemerintah sehingga November 2023 diperkirakan tiba musim hujan," katanya. ● ant

Title	Nilai Ekspor Sumsel Capai 505,60 Juta Dolar AS pada Agustus 2023	
Date	5 Oktober 2023	
Media	Neraca	
Page	9	
Author	Ant	

Nilai Ekspor Sumsel Capai 505,60 Juta Dolar AS pada Agustus 2023

NERACA

Palembang - Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan nilai ekspor Sumatera Selatan (Sumsel) pada bulan Agustus 2023 mencapai 505,60 juta dolar AS, atau turun 7,21 persen jika dibanding dengan ekspor Juli 2023 senilai 544,87 juta dolar AS.

"Nilai ekspor Sumsel pada Agustus 2023 mencapai 505,60 juta dolar AS atau turun 39,27 juta (7,21 persen) dibanding Juli 2023, senilai 544,87 juta dolar AS, dan juga mengalami penurunan 235,23 juta dolar AS (31,75 persen) dibanding Agustus 2022, yakni 740,83 juta dolar AS," kata Kepala BPS Sumsel Moh Wahyu Yulianto di Palembang, Selasa (3/10).

Ia menjelaskan penurunan tersebut disebabkan nilai ekspor nonmigas mencapai 450,60 juta dolar AS, atau mengalami penurunan sebesar 55,93 juta dolar AS (11,04 persen), dibandingkan periode bulan sebelumnya senilai 506,53 juta dolar AS.

"Penurunan ekspor nonmigas terutama disebabkan oleh dari turunnya nilai ekspor karet dari 93,23 juta dolar AS, menjadi 76,53 juta dolar AS, dan juga nilai ekspor pulp dari kayu dari 104,03 juta dolar AS, menjadi 88,23 juta dolar AS. Namun, terjadi peningkatan pada nilai ekspor kertas dan karton yang mencapai 8,01 juta dolar AS, dari sebelumnya senilai 6,65 juta dolar AS," jelasnya.

Ia mengatakan secara kumulatif nilai ekspor Sumsel senilai 4,51 miliar juta dolar AS atau turun 438,82 juta dolar (8,86 persen) dibanding periode yang sama tahun 2022, yang mencapai 4,95 miliar juta dolar AS.


Sedangkan, negara menjadi tujuan ekspor terbesar pada Agustus 2023 adalah Tiongkok senilai 180,54 juta dolar AS, Malaysia senilai 58,41 juta dolar AS, dan Korea Selatan senilai 58,20 juta dolar AS.


BPS Sumsel juga mencatat nilai impor pada Agustus 2023 mencapai 142,79 juta dolar AS, atau naik sebesar 108,16 persen, jika dibandingkan periode Juli 2023 senilai 68,60 juta dolar AS.

Ia menjelaskan kenaikan itu disebabkan oleh naiknya nilai impor nonmigas pada komoditas mesin dan peralatan mekanis sebesar 88,50 juta (397,92 persen), atau mencapai 110,74 dolar AS, jika dibanding pada Juli 2023 senilai 22,24 dolar AS.

Namun, nilai impor Sumsel Januari-Agustus 2023 mencapai 566,94 juta dolar atau mengalami penurunan 77,04 juta dolar (11,96 persen), jika dibandingkan periode yang sama pada tahun 2022 senilai 643,98 juta dolar AS.

"Penurunan tersebut disebabkan oleh nilai impor migas yang turun dari 74,62 juta dolar AS menjadi 29,54 juta dolar AS, dan nilai impor nonmigas yang mengalami penurunan dari 569,36 juta dolar AS menjadi 537,40 juta dolar AS," jelasnya.

Kemudian, tiga negara pemasok barang impor terbesar Januari-Juli 2023 adalah Tiongkok senilai 271,66 juta dolar AS, Malaysia 52,58 juta dolar AS, dan Vietnam 36,98 juta dolar AS. Neraca Perdagangan Sumsel pada Agustus 2023 mengalami surplus 362,81 juta dolar AS. 

Title	Pemkot Depok Antisipasi Pengadiln Harga dan Stok Beras	
Date	5 Oktober 2023	
Media	Neraca	
Page	9	
Author	Ant	

Pemkot Depok Antisipasi Pengendalian Harga dan Stok Beras

NERACA

Depok - Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono mengatakan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, Jawa Barat fokus untuk pengendalian harga dan stok beras di pasar agar mencukupi kebutuhan masyarakat.


"Alhamdulillah, kami telah rakor High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Depok hasilnya kami fokus pengendalian harga beras di pasar kami melakukan antisipasi," kata Imam Budi Hartono di Depok, Jawa Barat, dikutip Antara, kemarin.

Imam Budi Hartono mengatakan pengendalian harga beras di Depok penting karena di musim kemarau panjang dan terdapat beberapa wilayah produksi beras gagal panen. "Ini langkah kami melakukan pengendalian beras di pasar karena sangat penting untuk memenuhi kebutuhan warga Depok," tuturnya.

Ia mengungkapkan sejumlah langkah strategis Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dalam mengendalikan harga beras dengan menggelar pasar murah dan memberikan jaring pengaman sosial kepada masyarakat Kota Depok. "Kami punya persediaan beras di Bulog. Kami akan mengadakan pasar murah ataupun memberikan jaring pengaman sosial ke masyarakat Depok tidak mampu," tuturnya.

Selain itu Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Polres Metro Depok serta Kodim 0508/Depok berkolaborasi untuk mengawasi pedagang atau orang-orang yang memanfaatkan kesempatan ketersediaan dan harga beras.

Imam Budi Hartono mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi dan tidak melaporkan kepada pemerintah ataupun TNI-Polri, jika menemukan menahan atau menimbun stok beras. "Jangan sampai nanti ada yang menahan stok beras, dengan pikiran ketika harga tinggi dia baru jual. Kalau ada seperti itu laporkan ke kami," ujarnya. ● ant

Title	Pemkot Palembang Pastikan Stok Beras Aman Hingga Akhir Tahun	 Kementerian Pertanian
Date	5 Oktober 2023	
Media	Neraca	
Page	9	
Author	Ant	

Pemkot Palembang Pastikan Stok Beras Aman Hingga Akhir Tahun

NERACA

Palembang - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, Sumatera Selatan, memastikan stok beras aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di kota ini hingga akhir Desember 2023.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Palembang M Raimon Lauri saat dikonfirmasi dikutip Antara, kemarin, mengatakan meskipun kini beras mengalami kenaikan harga, namun melalui program pemerintah pusat dengan Bulog yakni Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) membuat stok beras tercukupi hingga akhir Desember 2023.

Ia menerangkan sebanyak 22 ton beras disiapkan melalui program tersebut dan kini telah didistribusikan sebanyak 11 ton.

Program itu dilaksanakan melalui Dinas Perdagangan dengan cara membuat gerai sembako di pasar - pasar tradisional yang ada di Kota Palembang.


"Masyarakat bisa membeli di pasar tradisional dengan pedagang yang ada spanduk bertuliskan program Bulog SPHP," kata Raimon.

Ia menambahkan masyarakat bisa membeli langsung beras itu di seluruh pasar tradisional yang ada tanpa persyaratan apapun.

"Semua kalangan masyarakat bisa membeli beras tersebut dengan harga yang telah ditetapkan Bulog. Namun kami mengimbau masyarakat untuk bijak dalam berbelanja dan belanja sesuai dengan kebutuhan," katanya.


Sebelumnya Kepala Perum Bulog Sumsel Babel Mohammad Alexander mengatakan bahwa Bulog telah menggelontorkan beras bantuan kepada penerima bantuan pada tahap kedua yaitu 582.370 keluarga penerima manfaat (KPM) dengan total beras yang digelontorkan sebanyak 17.457 ton sampai dengan bulan November 2023. Perbedaan jumlah KPM dibanding tahap pertama, lantaran masih adanya pembaruan dan pencocokan data dari Kementerian Sosial.

Untuk rincian masing-masing wilayah diantaranya 2.494 ton untuk Kantor Wilayah Sumsel, 922 ton Kantor Cabang Ogan Komering Ulu (OKU), 1.195 ton Kantor Cabang Lahat, dan 719 ton Kantor Cabang Lubuklinggau, serta Bangka sebanyak 350 ton dan Belitung sebanyak 137 ton. ● ant

Title	STOK BERAS NASIONAL	 Kementerian Pertanian
Date	5 Oktober 2023	
Media	Neraca	
Page	3	
Author	Neraca/Antarafoto/Prasetia Fauzan/Spt	



NERACA/Antarafoto/Prasetia Fauzan/Spt
STOK BERAS NASIONAL : Pekerja menurunkan beras murah yang dijual seharga Rp52 ribu per kemasan lima kilogram dari bak truk di Kelurahan Balowerti, Kota Kediri, Jawa Timur, Selasa (4/10/2023). Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan stok beras nasional saat ini sebanyak 1,7 ton dan dipastikan aman hingga akhir tahun 2023.

Title	TINJAU PASAR INDUK BERAS CIPINANG	
Date	5 Oktober 2023	
Media	Neraca	
Page	1	
Author	Neraca/Antarafoto/Fauzan/Spt	



NERACA/Antarafoto/Fauzan/Spt

TINJAU PASAR INDUK BERAS CIPINANG : Menteri BUMN Erick Thohir (tengah) bersama Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo (kanan) dan Dirut Perum Bulog Budi Waseso (kiri) meninjau harga beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta, Rabu (4/10/2023). Kunjungan itu dalam rangka peninjauan stok beras, stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) sekaligus pengecekan harga beras di PIBC.